



KOMINFO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

FEBRUARI 2023

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Medan Merdeka Barat 9, Jakarta, 10110

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.

Mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (selanjutnya disebut, "Badan Litbang SDM") Kementerian Kominfo Tahun 2022 rampung pada waktunya.

LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan ini diharapkan akan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan valuasi dan analisis

kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.⁽¹⁾

Dari sisi peraturan perundang-undangan, LAKIP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2022, Badan Litbang SDM melanjutkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024, Renstra Badan Litbang SDM 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

LAKIP Badan Litbang SDM TA 2022 diharapkan dapat memberi gambaran tentang capaian Badan Litbang SDM selama tahun 2022 serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan program pengembangan SDM. Sangat kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dalam menggambarkan akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun melalui LAKIP ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik dari masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam mendorong pembangunan bidang komunikasi dan informatika khususnya pengembangan SDM Indonesia serta menggambarkan kinerja dan kinerja tambahan yang kami hasilkan.

1. Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

“ Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung Badan Litbang SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terjalin dengan baik di waktu-waktu selanjutnya ”

Jakarta, Februari 2023

 **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM,**



Ditandatangani secara elektronik
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

HARY BUDIARTO

Dr. Hary Budiarto M.Kom

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Fungsi	8
C. Sumber Daya Manusia	
Badan Litbang SDM	14
D. Budaya Organisasi.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Sasaran Program	21
B. Arah Kebijakan Badan Litbang SDM Tahun 2020-2024.....	23
C. Indikator Kinerja	25
D. Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
SP.1. Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK.....	38
SP.2. Tercapainya Target PNBK Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62
SP.3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.....	65
B. Realisasi Anggaran	68
PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo	10
Tabel 1. 2 Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo	11
Tabel 2. 1 Target RPJMN Badan Litbang SDM 2020-2024.....	20
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	21
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Program.....	22
Tabel 2. 4 Cascading Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Berdasarkan Renstra 2020-2024.....	22
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022	27
Tabel 3. 1 Capaian Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Dalam RPJMN	31
Tabel 3. 2 Capaian Badan Litbang SDM Dalam Renstra Kementerian Kominfo	33
Tabel 3. 3 Capaian Renstra Badan Litbang SDM 2020-2024	34
Tabel 3. 4 Capaian Badan Litbang SDM Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022	35
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Badan Litbang SDM.....	36
Tabel 3. 6 Rincian Capaian Kinerja Badan Litbang SDM TA 2022 Per Triwulan.....	37
Tabel 3. 7 IKSP 1.1. Jumlah Peserta Pelatihan Digital Skill	38
Tabel 3. 8 IKSP 1.2. Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial.....	52
Tabel 3. 9 IKSP 2.1. Persentase (%) Hasil Riset dan Penelitian yang Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang TIK	55
Tabel 3. 10 Program Studi Beasiswa S2 Informatika.....	56
Tabel 3. 11 Program Studi Beasiswa S2 Komunikasi.....	57
Tabel 3. 12 Program Studi Beasiswa S2 Luar Negeri.....	57
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Kelulusan Penerima Beasiswa S2 Tepat Waktu Tahun 2022.....	58
Tabel 3. 14 IKSP 2.1. Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	63
Tabel 3. 15 Sumber Pendapatan PNBPN di Lingkungan Badan Litbang SDM.....	63
Tabel 3. 16 Penerimaan PNBPN di Lingkungan.....	63
Tabel 3. 17 Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala	64
Tabel 3. 18 IKSP 3.1. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).....	65
Tabel 3. 19 Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2020 s.d Tahun 2022.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Litbang SDM (Pusat).....	9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT BBPSDMP Kominfo.....	10
Gambar 1.3 Struktur Organisasi UPT BPSDMP Kominfo	11
Gambar 1.4 Struktur Organisasi STMM Yogyakarta	12
Gambar 1.5 Struktur Organisasi UPT BPPTIK.....	13
Gambar 1.6 Gambaran Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM Tahun 2022	14
Gambar 1.7 Sebaran JFT Per Satker/UPT Tahun 2022	14
Gambar 1.8 Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan	15
Gambar 1.9 Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang	15
Gambar 1.10 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Gambar 1.11 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat Jabatan.....	15
Gambar 2.1 Sasaran Pengembangan SDM Era Digital	23
Gambar 2.2 Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Litbang SDM 2020–2024	25
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022	26
Gambar 3.1 Capaian DTS Tahun 2022 (termasuk VSGA).....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2022.....	88
Lampiran 2 SOP Verifikasi Data Peserta Digital Talent Scholarship.....	91
Lampiran 3 Data Peserta Digital Talent Scholarship Tahun 2022.....	94
Lampiran 4 Kabatan–Definisi dan Kriteria Peserta DTS dan DLA Satker UPT TTE.....	96

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah⁽²⁾ dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.⁽³⁾ LAKIP menyajikan pencapaian kinerja Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Litbang SDM dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024, Renstra Badan Litbang SDM 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pada tahun 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan SDM telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program (SP) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dengan pencapaian sebagai berikut:

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842

1. Dari 5 (lima) IKSP yang telah ditetapkan, sebanyak 3 (tiga) IKSP atau sekitar 60% IKSP yang pencapaiannya melebihi target (>100%)



IKSP melebihi target (>100%)

2. IKSP yang pencapaiannya melebihi target dari yang ditetapkan (>100%) adalah :

1 Jumlah Peserta Pelatihan Digital Skill



- a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas)
- b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

2 Persentase (%) Realisasi Target

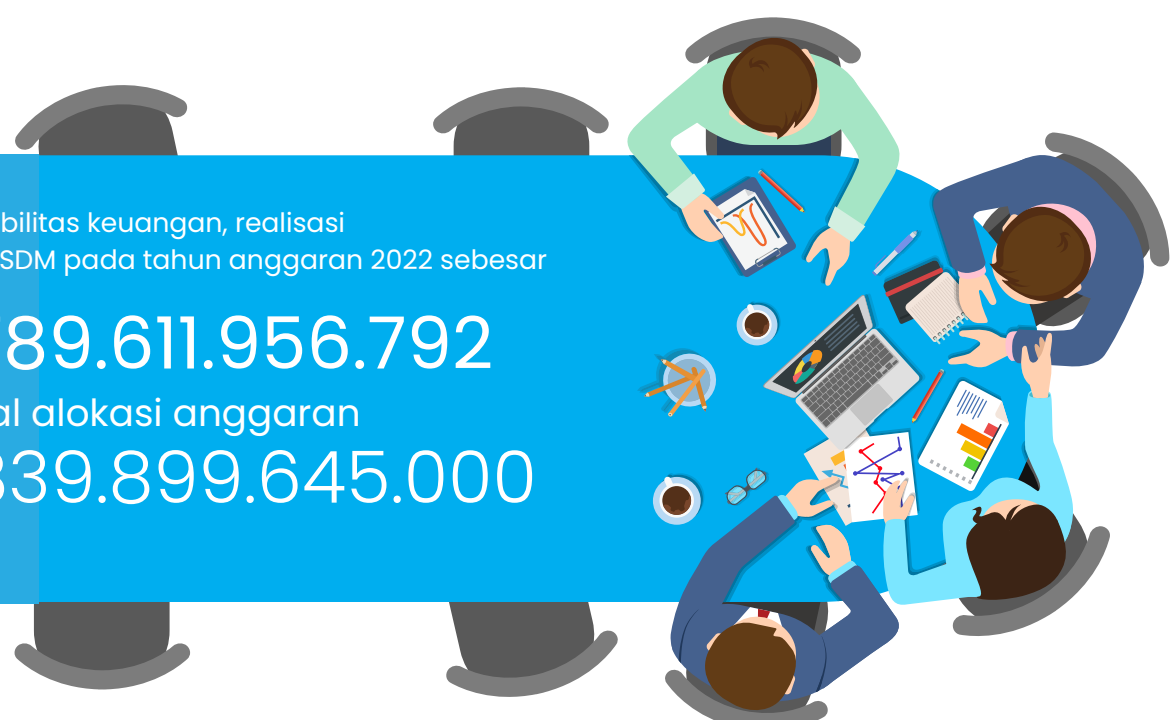


PNBP Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3 Indeks Reformasi



Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)



Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi Badan Litbang SDM pada tahun anggaran 2022 sebesar

Rp 789.611.956.792

dari total alokasi anggaran

Rp 839.899.645.000

Dengan kondisi persentase penyerapan sebesar

94,01%

3

target Indikator Badan Litbang SDM melampaui target dari total 5 target Indikator.

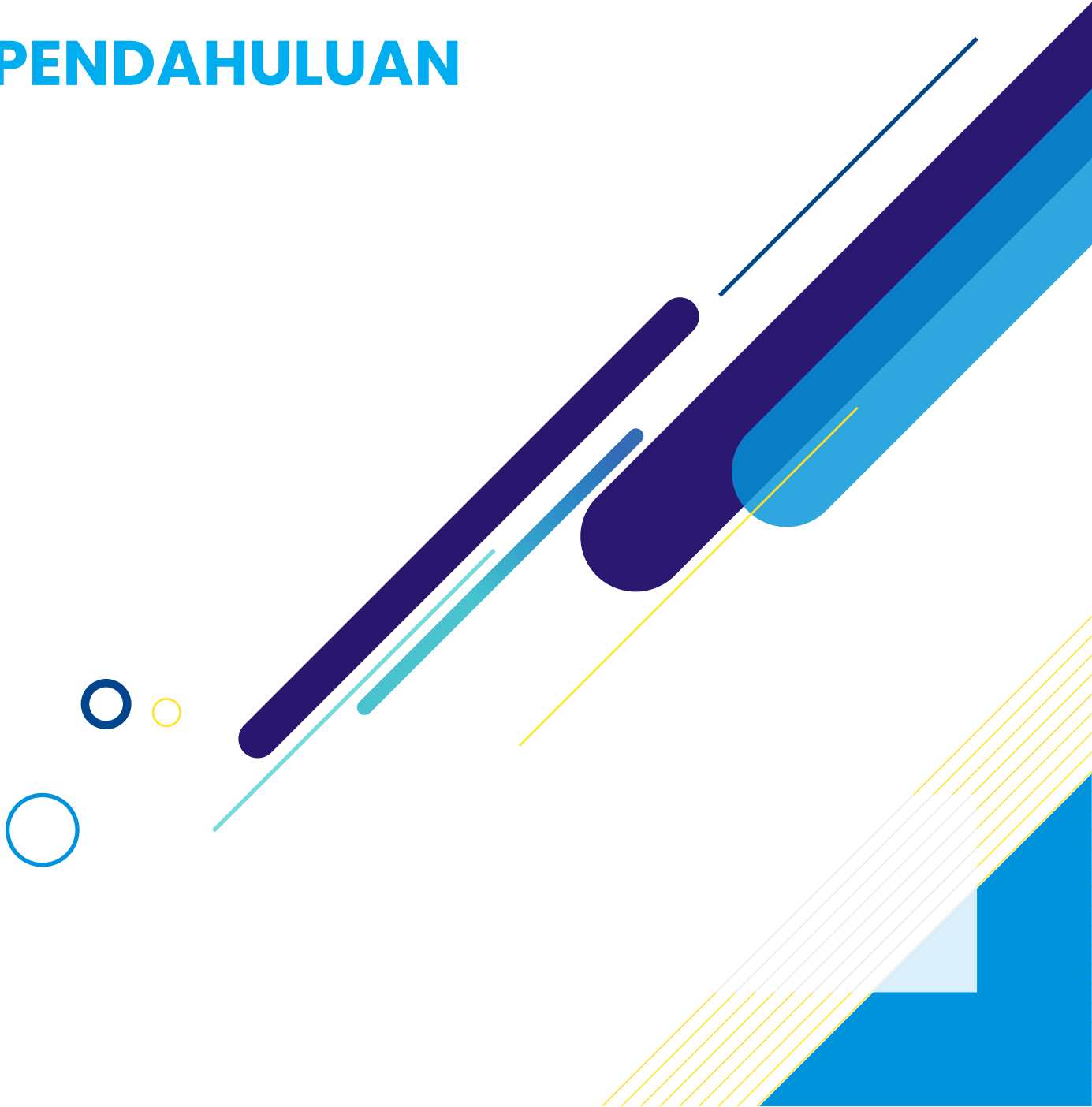
Kondisi lebih detail mengenai capaian kinerja tersebut akan ditampilkan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka terus mendorong terwujudnya kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, Badan Litbang SDM berusaha mengatasi dan mencari solusi atas kendala dan hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Badan Litbang SDM juga telah menerapkan Manajemen Risiko dalam rangka identifikasi risiko serta melakukan mitigasi risiko serta tindak lanjutnya.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* Badan Litbang SDM dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Badan Litbang SDM.

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai, “Kementerian Kominfo”) merupakan institusi pemerintah yang diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada pelaksanaannya sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program dan kegiatan terkait dengan satuan kerja yang dinaunginya. Dalam menjalankan tugas di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (selanjutnya disebut sebagai, “Badan Litbang SDM”) sebagai salah satu unit kerja eselon I menjalankan fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika. ⁽⁴⁾

Namun, dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengatur bahwa BRIN berperan membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi (Pasal 3). Kemudian, sesuai amanat Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96

kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.⁽⁵⁾ Maka, tugas dan fungsi penelitian di Badan Litbang SDM telah beralih ke BRIN setelah peraturan tersebut diundangkan. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini proses revisi SOTK Kementerian Kominfo tengah disusun dan diperkirakan rampung serta berlaku pada tahun 2023.

Presiden Joko Widodo meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul akan membawa Indonesia mampu bersaing dalam hal ekonomi digital. Untuk itu, Presiden meminta kepada pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar dari program pendidikan yang ditetapkan oleh universitas. SDM unggul, tutur Presiden, harus mampu dipersiapkan karena dunia nantinya akan berubah menjadi *hybrid*, baik *hybrid knowledge* maupun *hybrid skill*. Oleh sebab itu, mahasiswa harus dipersiapkan untuk selalu siap belajar dalam rangka menghadapi perubahan yang terus bermunculan. Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi digital. Pasar digital Indonesia bahkan tumbuh pesat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kepala Negara memprediksi, pada tahun 2025, pasar digital Indonesia dapat meningkat sampai di angka USD146 miliar. ⁽⁶⁾

Secara umum, Presiden Jokowi mengungkap bahwa APBN 2022 difokuskan pada enam kebijakan utama. *Pertama*, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. *Kedua*, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. *Ketiga*, peningkatan SDM yang unggul. *Keempat*, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. *Kelima*,

5. Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2021

6. https://www.setneg.go.id/baca/index/sdm_unggul_bekal_indonesia_bersaing_dalam_ekonomi_digital_dan_ekonomi_hijau_1

penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan *zero-based budgeting* agar belanja lebih efisien.⁽⁷⁾

Berkorelasi langsung dengan isu ketiga, Badan Litbang SDM berusaha memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia dengan mengusung program prioritas *Digital Talent Scholarship* (selanjutnya disebut

sebagai, “DTS”). Berangkat dari hasil penelitian Bank Dunia dan McKinsey, dalam kurun waktu tahun 2015–2030, kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai 9 juta orang dengan kebutuhan rata-rata 600.000 orang per tahun.⁽⁸⁾ DTS telah dimulai sejak tahun 2018 dan resmi menjadi bagian dari target RPJMN, Renstra Kementerian Kominfo dan Badan Litbang SDM tahun 2020–2024. Tujuan utama program ini adalah mengurangi kesenjangan kemampuan digital di Indonesia baik dari Indonesia bagian Barat sampai dengan bagian Timur.

7. “Jokowi Sebut APBN 2022 Fokus pada 6 Kebijakan Utama, Apa Saja?”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211129/10/1471608/jokowi-sebut-apbn-2022-fokus-pada-6-kebijakan-utama-apa-saja>, diakses 30 Januari 2023

8. <https://balitbangsdm.kominfo.go.id/berita-kepala-baru-semangat-baru-19-712>

Dasar-dasar Kebijakan RPJMN IV (2020-2024)



Dasar-dasar Kebijakan RPJMN IV (2020–2024)⁽⁹⁾

9. Sandjaja Sarwohadi, *Arah Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam RPJMN 2020–2024 dan Rancangan Awal RKP 2022*, disampaikan pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, https://bkd.jatengprov.go.id/assets/download/Arah_Pembangunan_Bid._Aparatur_Negara_dan_Ranwal_RKP_2022_final_-_BKD_Jateng.pdf

Saat ini Indonesia sudah memasuki era digital, era industri 4.0, dan memasuki masyarakat digital 5.0. Maka dari itu, talenta digital sangat diperlukan. Tidak lagi melakukan digitasi atau digitalisasi, tetapi melakukan transformasi digital. Transformasi digital bertujuan untuk mengubah pola pikir konvensional menjadi pola pikir berbasis teknologi digital. Transformasi digital menuntut suatu kompetensi yang lebih dari biasanya. Siapa yang tidak mengikuti maka akan mengalami *disruption*, itu adalah karakteristik dari transformasi digital. Dengan begitu, mau tidak mau harus mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi digital. ⁽¹⁰⁾

Indonesia perlu menyelaraskan pasokan keterampilan dengan permintaan industri yang terus berkembang dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar serta wilayah Indonesia bagian Barat namun juga melebarkan manfaat program ini ke wilayah Timur dan daerah 3T. Selain itu, kolaborasi sinergis antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara simultan telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang digital yang unggul dan berdaya saing, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Melalui pendidikan non-formal, berupa pelatihan pada tiga level keterampilan digital yakni *Basic Digital Skill*, *Intermediate Digital Skill* dan *Advanced Digital Skill*.

Dalam *Basic Digital Skill*, pemerintah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memberikan pelatihan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Sementara pada tingkatan *Intermediate Digital Skill*, Kominfo menyiapkan program

10. <https://kilaskementerian.kompas.com/kemenkominfo/read/2022/12/22/10233171/lewat-digi-ers-day-kemenkominfo-hadirkan-terobosan-peningkatan-kompetensi>

Digital Talent Scholarship (DTS). Bidang yang bisa dipelajari mulai dari keamanan siber, kecerdasan buatan, *big data*, komputasi awan, *coding*, *Augmented Reality (AR)* dan *Virtual Reality (VR)*. Sedangkan pada *Advanced Digital Skill*, Kominfo memberikan pelatihan digital tingkat lanjutan melalui *Digital Leadership Academy (DLA)* bagi pimpinan lembaga publik maupun swasta. Selain itu, Kominfo juga menyiapkan program beasiswa pendidikan formal pada jenjang Program Master (S2) di bidang Teknologi Informasi yang tahun ini terbuka bagi 200 putra-putri terbaik bangsa. Program ini terbuka untuk masyarakat yang bekerja di sektor TIK, aparaturnya Pemerintah Pusat dan Daerah, serta TNI dan POLRI, yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik dalam maupun luar negeri. ⁽¹¹⁾

11. <https://www.antaraneews.com/berita/2887373/pemerintah-siapkan-sdm-digital-yang-unggul-dan-berdaya-saing>

Apabila diuraikan, berikut 3 level pelatihan keterampilan TIK yang dilaksanakan Kementerian Kominfo dan unit kerja pelaksana:



Selain DTS dan DLA, Badan Litbang SDM juga melaksanakan peningkatan kompetensi SDM digital dasar melalui kegiatan Pengenalan TIK bagi wanita, anak-anak, disabilitas dan masyarakat umum. Yang membedakan Pengenalan TIK yang dilaksanakan Badan Litbang SDM dengan GNLD Ditjen Aptika adalah Pengenalan TIK yang dilaksanakan Badan Litbang SDM dilaksanakan dengan skema *facility-based* dengan memanfaatkan perangkat komputer yang dimiliki 9 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Litbang SDM.

Dalam rangka upaya untuk menemukan *treatment* pengembangan SDM TIK yang tepat bagi karakter masyarakat Indonesia, Badan Litbang SDM meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2022 (IMDI 2022). Indeks ini mengukur *skill* dan literasi digital masyarakat di berbagai kabupaten/kota Indonesia tahun 2022. Indeks ini memberikan gambaran kemampuan digital masyarakat Indonesia,

infrastruktur digital, hingga serapan teknologi digital di kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Pada saat peluncuran, **Menkominfo Johnny G. Plate** menyoroti masih rendahnya angka literasi digital Indonesia khususnya untuk aspek digital skill dan talent yang masih di bawah rata-rata se-ASEAN. Namun Menkominfo optimis Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh, termasuk untuk menyambut lapangan kerja digital yang akan *booming* beberapa tahun ke depan.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) mendapat nilai rata-rata 37,8 dari skor maksimum 100. Skor IMDI 2022 diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer berupa kuesioner yang diisi oleh 16.000 responden masyarakat dan 9.000 responden perusahaan dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah responden yang terlibat berjumlah 16.785 responden individu yang dipilih dengan metode *systematic random sampling* serta 9.601 responden industri yang dipilih dengan metode *simple random sampling*. Responden individu dilakukan dipilih di masing-masing desa atau kelurahan. Sedangkan sampel responden industri disusun dengan kriteria 50% pelaku Usaha Menengah Besar (UMB), dan 50% Usaha Menengah Kecil (UMK). Metode penghitungan indeks menggunakan metode *Multistage Principal Component Analysis* atau *Multistage CPA* untuk menentukan bobot subpilar dan pilar pembentuk IMD. ⁽¹²⁾



1. Basic Digital Skill

Pelatihan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dilaksanakan Ditjen Aplikasi Informatika



2. Intermediate Digital Skill

Digital Talent Scholarship (DTS) dilaksanakan Badan Litbang SDM



3. Advance Digital Skill

Digital Leadership Academy (DLA) dilaksanakan Badan Litbang SDM

12. <https://telset.id/news/telko/kominfo-indeks-masyarakat-digital-indonesia-2022-ini-hasilnya/>

Sementara data sekunder adalah data yang sudah tersedia seperti jumlah BTS dan infrastruktur lain. Rata-rata ini didapat dari sejumlah pilar yakni:



1. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem

Mengukur ketersediaan infrastruktur yang mendukung akses internet dan layanan digital dan terdiri atas subpilar akses dan adopsi teknologi digital serta ekosistem pembelajaran digital.

2. Pilar Keterampilan Digital

Mengukur kecakapan masyarakat menggunakan layanan digital. Hal ini termasuk berkomunikasi dan berpikir kritis, pengenalan dasar teknologi digital, serta keamanan menggunakan teknologi digital.

3. Pilar Pemberdayaan

Mengukur seberapa besar pemanfaatan internet dan digitalisasi oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dan pekerjaan

serta pemanfaatan teknologi digital oleh konsumen dan pemanfaatan teknologi oleh penjual. Bagian ini mendapatkan skor paling rendah di antara yang lain. Tercatat, masih banyak masyarakat seperti pelaku usaha di tingkat UMKM yang belum mengoptimalkan teknologi digital. Oleh karena itu, pemerintah akan menerapkan hilirisasi agar pemanfaatan teknologi digital makin meningkat dan lebih produktif. Pemerintah saat ini sendiri sedang berupaya mengimbangi pembangunan infrastruktur digital dengan hilirisasi berupa pemberdayaan dan pelibatan masyarakat.

4. Pilar Pekerjaan

Mengukur lapangan pekerjaan digital yang tersedia, dan tenaga kerja digital yang tersedia.



Pengukuran IMDI adalah bentuk Adopsi dan Komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan G20 *Digital Skills & Digital Literacy Toolkit*. Diharapkan data ini dapat menjadi basis pengukuran kompetensi digital masyarakat Indonesia, sehingga menjadi acuan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mengarahkan SDM di masa yang akan datang.⁽¹³⁾ IMDI *Digital Literacy and Digital Skill Toolkit* adalah sebuah *toolkit* yang dapat digunakan oleh negara-negara G-20 untuk mengukur kondisi literasi dan keterampilan digital masyarakat di masing-masing negara. *Toolkit* ini telah disampaikan sebagai salah satu *deliverables* pada forum *Digital Economy Working Group*, dan diterima baik oleh para negara anggota.⁽¹⁴⁾

Mengutip Menkominfo, dari hasil kajian di atas, disparitas IMDI terbilang tinggi. Sangat tinggi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, sehingga tantangannya adalah bagaimana untuk lebih menyeimbangkan

agar Indeks Masyarakat Digital itu lebih merata di Indonesia.⁽¹⁵⁾

Pembangunan besar-besaran sudah dibangun di fiber optik, fiber link, *microwave link*, satelit, maupun *base transceiver station*. Tapi, pembangunan di sektor infrastruktur hulu digital juga harus diimbangi dengan hilirisasi atau pemanfaatan dan pengembangan digitalnya di Indonesia.⁽¹⁶⁾ Oleh karena itu, sesuai amanat RPJMN dan Renstra 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja 2022, program prioritas terkait pengembangan SDM dengan agenda utama pemerataan skor IMDI masih perlu dilanjutkan demi memanfaatkan bonus demografi Indonesia untuk menyambut lapangan kerja digital yang akan *booming* beberapa tahun ke depan.

13.<https://kumparan.com/kumparantech/skor-indeks-masyarakat-digital-37-8-dari-100-literasi-digital-ri-masih-rendah-1zTxxrvrAHO/4>

14.<https://balitbangsdm.kominfo.go.id/satker/paipk/berita-peluncuran-indeks-masyarakat-digital-indonesia-tahun-2022-5-37>

15.<https://www.antaranews.com/berita/3314226/pemerataan-indeks-masyarakat-digital-perlu-digiatkan-di-daerah>

16.<https://techno.okezone.com/read/2022/12/27/54/2734976/menkominfo-indeks-masyarakat-digital-indonesia-2022-sebesar-37-8>

B. Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Litbang SDM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021⁽¹⁷⁾ menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Litbang SDM menyelenggarakan fungsi :

1

Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia, komunikasi dan informatika;



2

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia, komunikasi dan informatika;



3

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia, komunikasi dan informatika;



4

Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

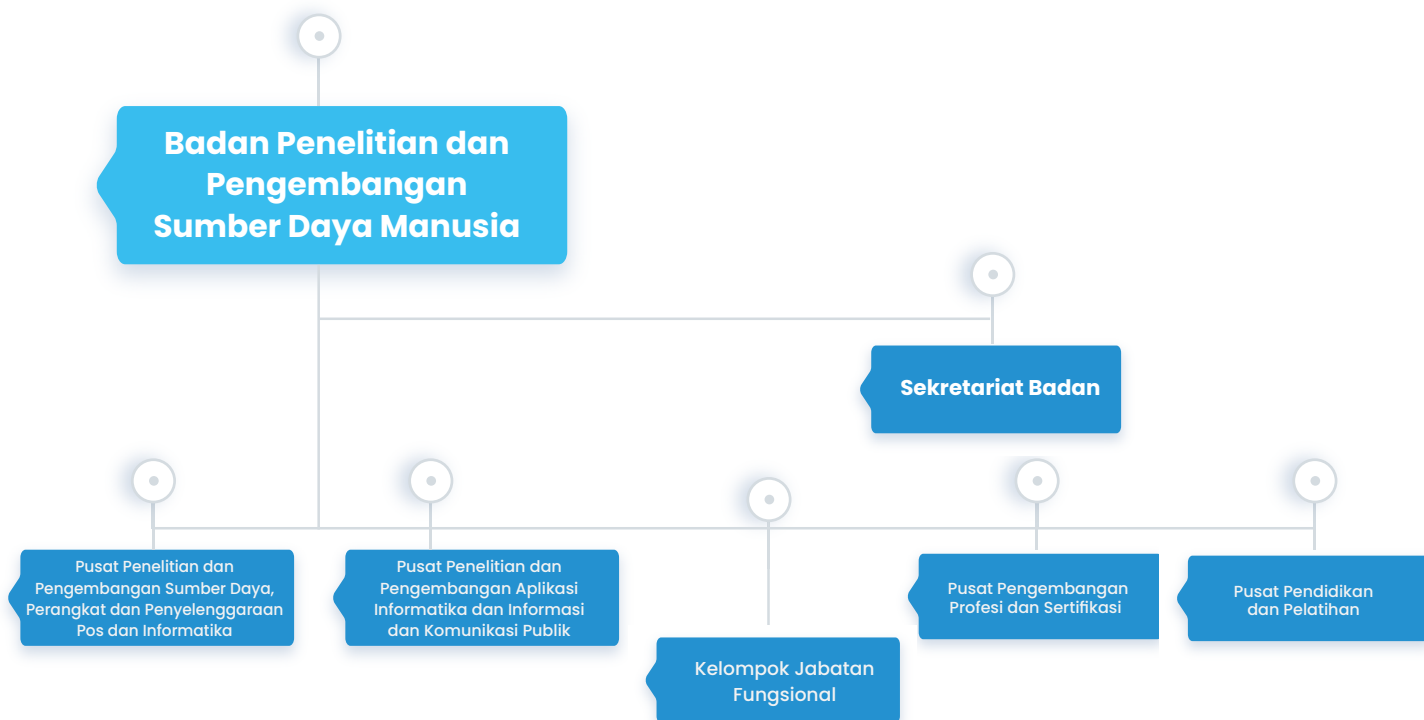


5

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Litbang SDM (Pusat)

Namun, peraturan terkait SOTK tersebut sedang dalam proses penyusunan revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini yang memisahkan fungsi penelitian dari *core business* Badan Litbang SDM.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Litbang SDM juga didukung oleh UPT di daerah yang ditetapkan dalam beberapa Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.** ⁽¹⁸⁾

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP kominfo) Medan dan Makassar yang dipimpin oleh Kepala BBPSDMP

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 444.

kominfo, memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
- b. Penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- c. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika
- d. Penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- e. Penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian bidang komunikasi dan informatika; dan

- f. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Susunan organisasi BBPSDMP Kominfo terdiri dari: Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) dipimpin Kepala BPSDMP Kominfo. memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
- b. Penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- c. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
- d. Penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
- e. Penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; dan
- f. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

BBPSDMP Kominfo Medan	BBPSDMP Kominfo Makassar
1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Kalimantan Barat 7. Kalimantan Utara	1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tenggara 3. Nusa Tenggara Timur 4. Maluku 5. Maluku Utara 6. Papua 7. Papua Barat

Tabel 1. 1 Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo

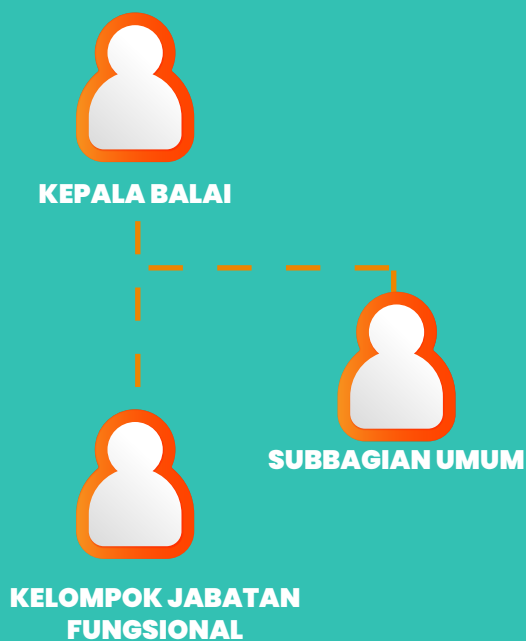


Gambar 1. 2 Struktur Organisasi UPT BBPSDMP Kominfo

BPSDMP Kominfo Jakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. DKI Jakarta 2. Sumatera Selatan 3. Bangka Belitung 4. Jambi 	BPSDMP Kominfo Bandung <ol style="list-style-type: none"> 1. Jawa Barat 2. Lampung 3. Banten 4. Bengkulu 	BPSDMP Kominfo Yogyakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Bali
BPSDMP Kominfo Banjarmasin <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timur 	BPSDMP Kominfo Surabaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Jawa Timur 2. Nusa Tenggara Barat 	BPSDMP Kominfo Manado <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Gorontalo

Tabel 1. 2 Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo

Susunan organisasi BPSDMP Kominfo terdiri dari: Sub bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional 2.

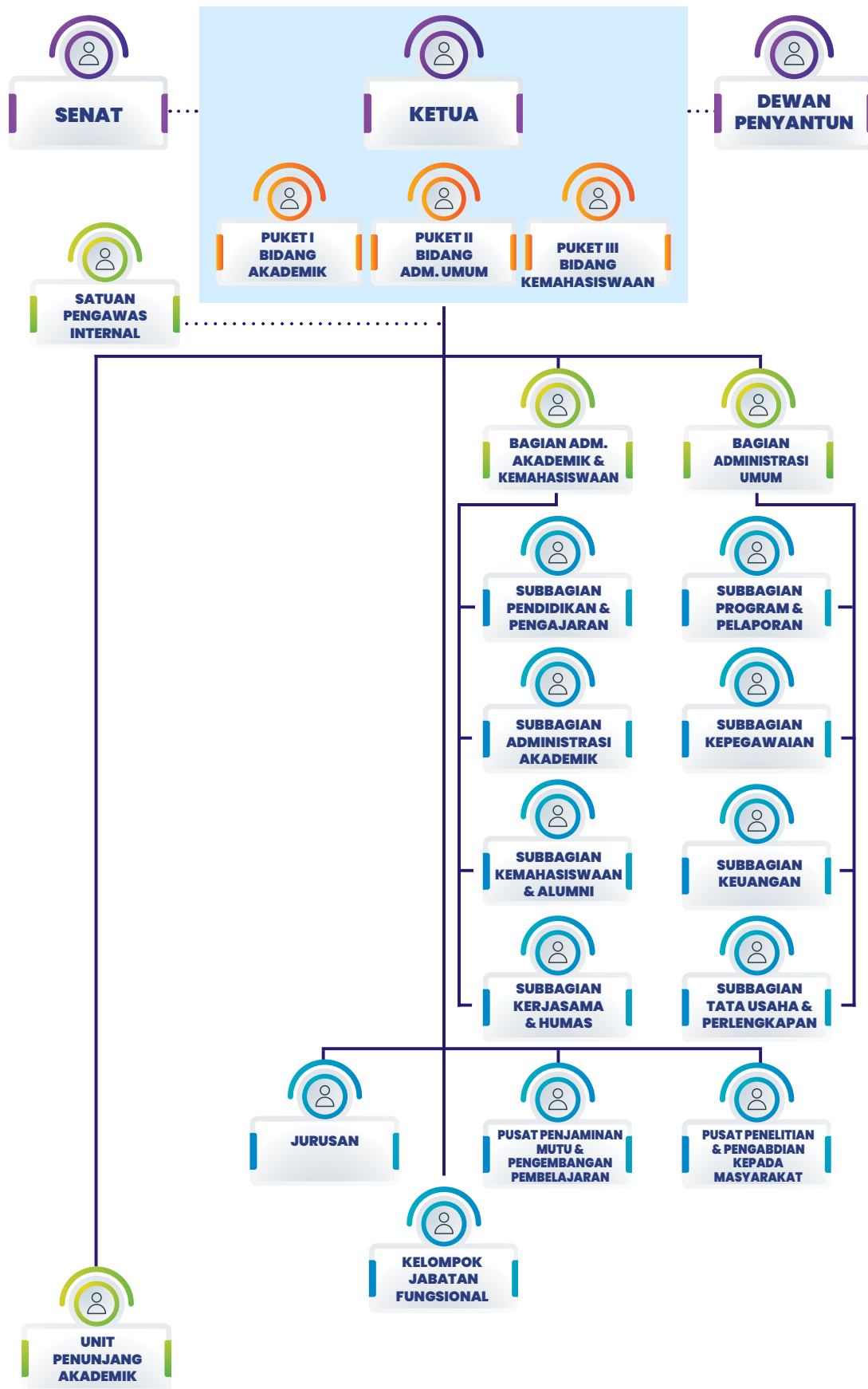


Gambar 1. 3 Struktur Organisasi UPT BPSDMP Kominfo

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media. ⁽¹⁹⁾

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian STMM, dalam melaksanakan Perpres Kemenkominfo menerbitkan Permenkominfo nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STMM yang dipimpin oleh Ketua STMM (setingkat Eselon II) dan memiliki tugas menyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyenggarakan pendidikan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi STMM terdiri dari: Ketua, Pembantu Ketua, Senat, Dewan Penyantun, Satuan Pengawas Internal, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Administrasi Umum, Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Unit Penunjang Akademik dan Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278.



Gambar 1.4 Struktur Organisasi STMM Yogyakarta

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. ⁽²⁰⁾

Sebagai salah satu UPT di lingkungan Badan Litbang SDM yang dipimpin oleh Kepala BPPTIK, memiliki tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi program pelatihan instansi pemerintah, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

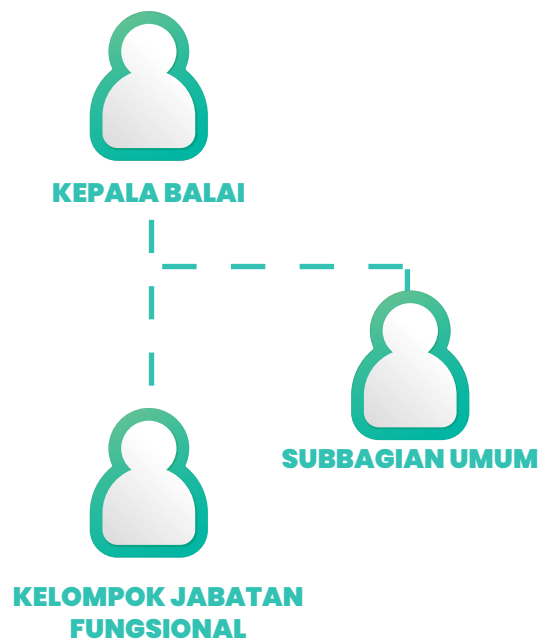
BPPTIK juga memiliki tugas melaksanakan pelatihan (*vocational training*), uji kompetensi dan sertifikasi serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 2668/M. PAN/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009 dan menyelenggarakan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 489/K.1/PDP.10.4 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis Bidang TIK.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPTIK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, pemasaran, pengolahan data dan informasi, evaluasi, pengawasan dan penjaminan mutu serta pelaporan di bidang pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi program pelatihan pemerintah, serta pelayanan produk jasa teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan produk jasa bidang teknologi informasi dan komunikasi;

- c. Penyiapan penyusunan dan pengembangan bahan kurikulum, standar, sistem, metode, perencanaan tenaga pengajar dan asesor, pelaksanaan pelatihan kerja, serta uji kompetensi dan sertifikasi masyarakat bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Penyiapan penyusunan dan pengembangan bahan kurikulum, standar, sistem, metode, perencanaan tenaga pengajar dan asesor, pelaksanaan pelatihan teknis, uji kompetensi dan sertifikasi aparatur, serta akreditasi lembaga pelatihan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. Pelaksanaan urusan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Susunan organisasi BPPTIK terdiri dari: Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 5 Struktur Organisasi UPT BPPTIK

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 445.

C. Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM

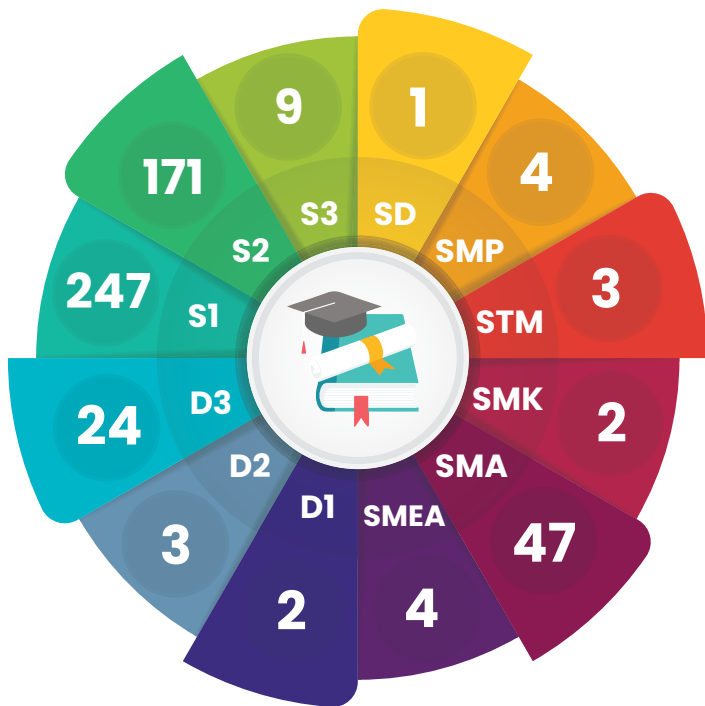
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Litbang SDM didukung oleh 742 pegawai dengan rincian 454 orang tercatat sebagai PNS, 63 orang CPNS penerimaan tahun 2022 dan PPNPN sebanyak 225 orang dari 15 (lima belas) Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis. Rincian pengelompokan pangkat jabatan terdiri dari 6 orang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), 9 orang Jabatan Administrator (JA), 167 orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), 76 (JFP atau JFT hasil penyetaraan), dan 259 Jabatan Pelaksana (JPL). Sementara itu, terdapat 20 pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2022.



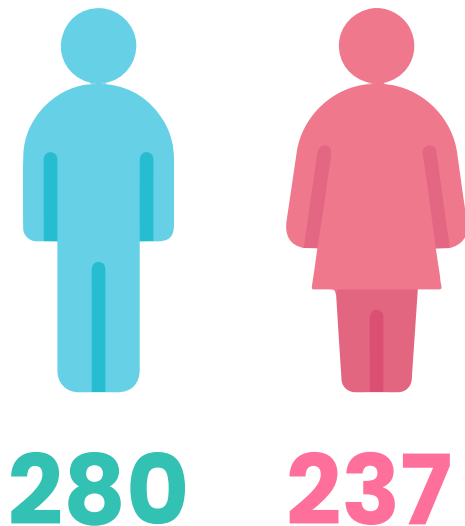
Gambar 1. 6 Gambaran Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM Tahun 2022



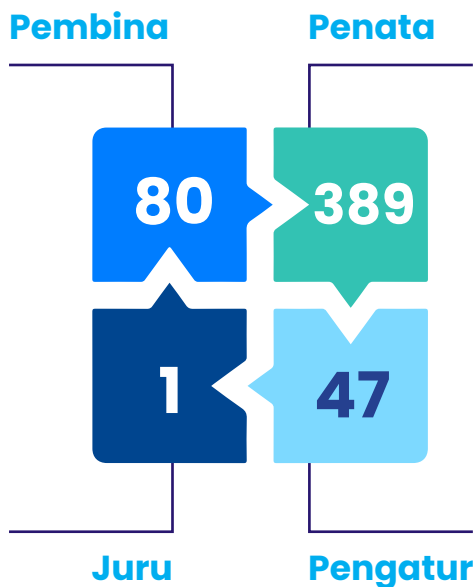
Gambar 1. 7 Sebaran JFT Per Satker/UPT Tahun 2022



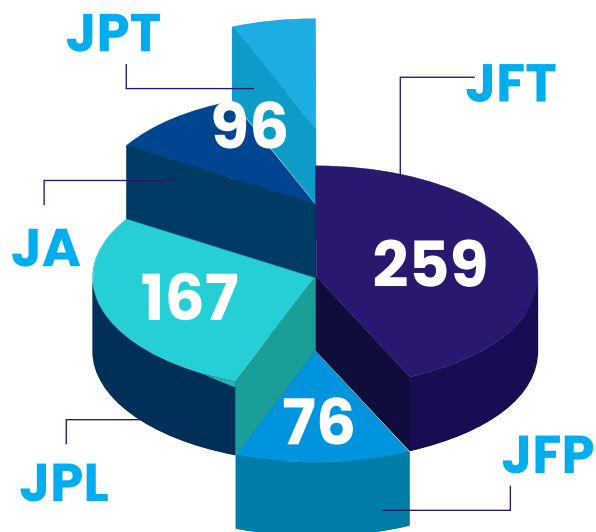
Gambar 1. 8 Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan



Gambar 1. 10 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1. 9 Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang



Gambar 1. 11 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat Jabatan

D. Budaya Organisasi



Perlu Akselerasi Transformasi Manajemen ASN Menuju Birokrasi Berkelas Dunia di 2024



Strategi 6P untuk Akselerasi Transformasi ASN





Satu Core Values ASN

- 1** Mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar dan panduan perilaku yang disusun sesuai dengan UU No : 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang mudah dipahami oleh seluruh ASN (top down process)
- 2** Mensarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh K/L/D dalam suatu rumusan baku yang berlaku secara umum (banyak kesamaan yang dapat disimpulkan menjadi satu core value (Bottom up process))
- 3** Satu Core Value akan membentuk dan menguatkan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional dimanapun ASN ditugaskan
- 4** Memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang ditugaskan ke instansi pemerintah lain (talent mobility)
- 5** Menjadi unsur memperkuat peran ASN sebagai perekat bangsa
- 6** Budaya kerja yang kuat akan mendorong peningkatan kinerja organisasi jangka panjang) menpan.go.id



Kompeten

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Akuntabel

Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Adaptif

Kami terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan

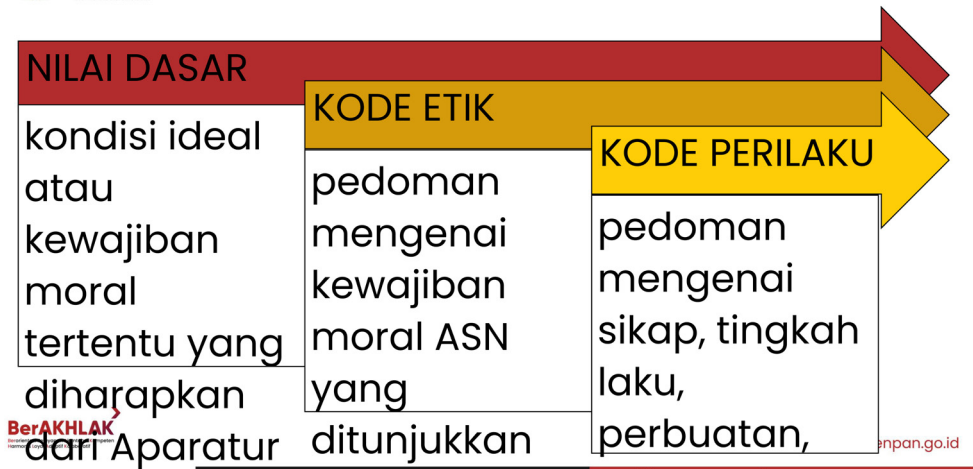
Berorientasi Pelayanan

Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

Kolaboratif

Kami membangun kerja sama yang sinergis

*) Disampaikan oleh Kedeputusan SDMA Kementerian PAN dan RB



Core value/Tata Nilai dasar Kementerian Kominfo adalah Profesional, Akuntabel, Integritas, Inovatif.

Pondasi yang Kuat untuk Transformasi ASN



Dalam implementasinya, kinerja Badan LitbangSDM turut mendukung dan menerapkan *core value* Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, pegawai di lingkungan Badan Litbang SDM diharapkan memenuhi ekspektasi yang diharapkan yakni:

1. Memahami dan menyelaraskan perilaku dengan **Core Values ASN** mengacu kepada **panduan perilaku/kode etik** yang sudah ditetapkan, karena ke depannya akan

sangat menentukan masa depan sebagai ASN, mencakup dan tidak terbatas pada aspek terkait evaluasi kinerja, Tunkin, Bonus, *Talent Class*, peluang pengembangan karir dan kesempatan untuk *learning & development*.

2. Bersama-sama membangun **Employer Branding ASN** yang kuat di masyarakat : **“Bangga Melayani Bangsa”**

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan SDM yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2024.

Berdasarkan Matriks Pembangunan RPJMN 2020–2024 pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024⁽²¹⁾, target Badan Litbang SDM masuk pada 3 ProP (Proyek Prioritas) yakni Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Peningkatan Literasi TIK Masyarakat, dan Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:

Proyek Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
ProP: Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Profesional	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang memperoleh Pelatihan dan Sertifikasi (termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Penerima Beasiswa S2/S3 yang lulus tepat waktu	90	90	90	95	95
ProP: Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pengenalan TIK	2.000	2.200	2.500	3.000	3.500
Pengenalan TIK kepada Masyarakat	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (termasuk lokus kawasan prioritas)	2.000	2.200	2.500	3.000	3.500
ProP: Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian
Kajian Strategis Penerapan Sistem <i>Big Data</i> Pemerintah	Jumlah Kajian Strategis Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian	1 kajian

Tabel 2.1 Target RPJMN Badan Litbang SDM 2020–2024

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2024, Badan Litbang SDM mengambil peran penting pada 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yakni sebagai berikut:

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10

SS.06

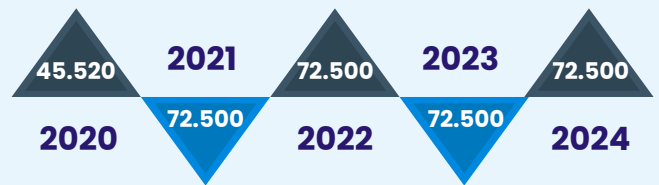
Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis

**IKSS.07**

Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK

SS.07

Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital

**IKSS.02**

Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital

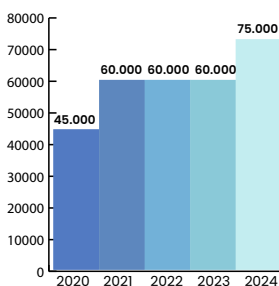
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

A. Sasaran Program

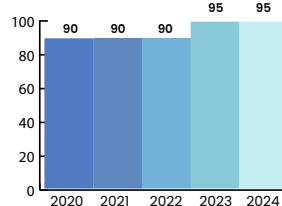
Dalam mendukung 3 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas, Badan Litbang SDM menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

Program Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

SP.05 | Meningkatnya kompetensi dan kemampuan SDM Nasional bidang TIK

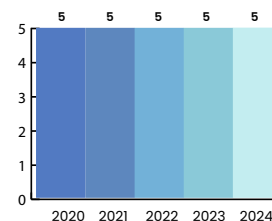


IKP.01 Jumlah peserta pelatihan *digital skill**
a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas)
b. SKKNI

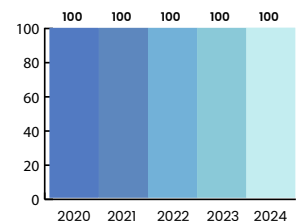


IKP.02 Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu

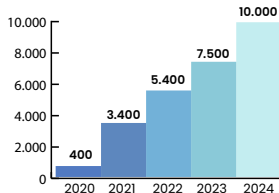
SP.06 | Meningkatnya kualitas riset dan penelitian bidang TIK



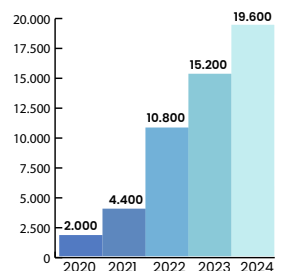
IKP.01 Persentase (%) peningkatan jumlah sitasi jurnal ilmiah terbitan Balitbang



IKP.02 Persentase (%) hasil riset dan penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang TIK



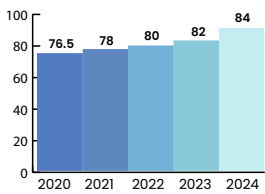
IKP.03 Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif)



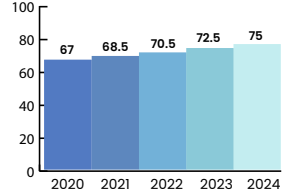
IKP.04 Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK* (kumulatif)

Program Dukungan Manajemen

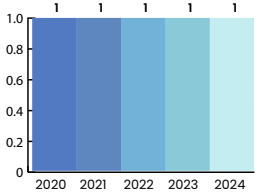
SP.1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BLSDM yang Bersih dan Efisien



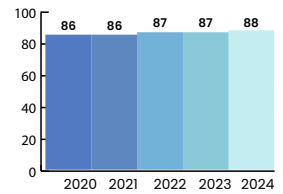
IKP.01 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BLSDM



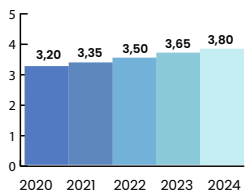
IKP.02 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BLSDM



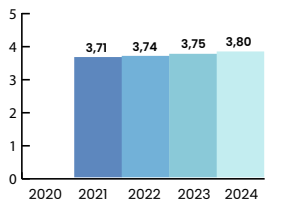
IKP.03 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK BLSDM Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK



IKP.04 Nilai Kinerja Anggaran BLSDM



IKP.05 Nilai SPIP Balitbang SDM

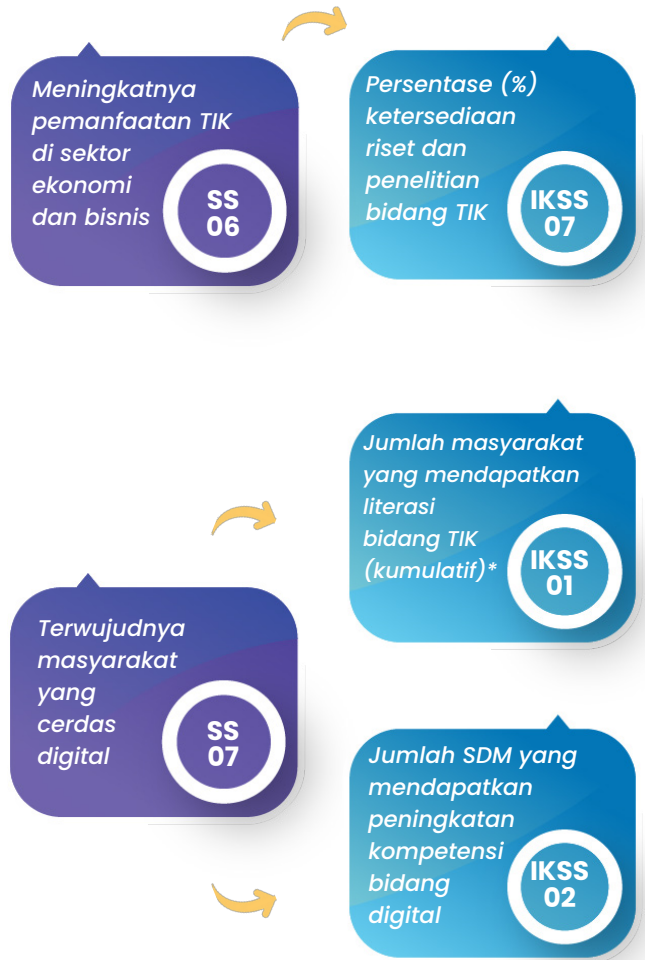


IKP.06 Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen BLSDM

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Program

SASARAN STRATEGIS (SS) KEMENTERIAN

SASARAN STRATEGIS (SS) BADAN LITBANG SDM



Tabel 2. 4 Cascading Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Berdasarkan Renstra 2020-2024

B. Arah Kebijakan Badan Litbang SDM Tahun 2020–2024

Sesuai dengan salah satu arahan presiden dan agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan kompetensi bidang TIK/digital menjadi sangat relevan, terlebih di dorong oleh agenda pembangunan nasional untuk pengembangan ekonomi digital, dan revolusi industri 4.0 serta penyelenggaraan *e-government*. Di samping itu, arah pembangunan nasional juga menekankan peningkatan literasi digital masyarakat untuk mendukung perkembangan dan pemanfaatan TIK. Walaupun pengembangan SDM dan edukasi bukan merupakan tanggung jawab utama Kemkominfo, peran Kemkominfo dalam memfasilitasi dan mengakselerasi peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM menjadi sangat penting terutama dalam mendukung transformasi digital untuk pengembangan ekonomi digital pada sektor fokus yang tertuang di dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.



Gambar 2.1 Sasaran Pengembangan SDM Era Digital

Arah kebijakan terkait pengembangan SDM bidang TIK/digital dititikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mendukung penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi melalui pengembangan kompetensi untuk angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda termasuk yang ada di kawasan prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi terutama ekonomi digital pada sektor fokus serta peningkatan kapasitas SDM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
2. Penguatan kelembagaan termasuk pengembangan kompetensi ASN, pembentukan ekosistem, dan standar kompetensi jabatan ASN khususnya dalam bidang TIK/digital serta manajemen talentanya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-government* yang dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Alih kompetensi melalui *reskilling*, *upskilling* dan *newskilling* khususnya bagi tenaga kerja bidang TIK/digital yang terdampak automasi sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja.
4. Mengurangi pengangguran bidang Kominfo melalui peningkatan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak serta peran industri/swasta dalam pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi SDM untuk sektor unggulan dan dapat menyediakan pelatihan berlandaskan standar kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang TIK/digital dan literasi digital yang akan terfokus pada segmen prioritas, strategi yang akan dijalankan meliputi:

1. Peningkatan kompetensi dan kemampuan digital untuk tenaga kerja Penguatan peran Kemkominfo sebagai fasilitator dan akselerator pengembangan kompetensi SDM bidang TIK/digital.
 - a. Peningkatan kualitas SKKNI bidang TIK/digital yang "*future-proof*" melalui kolaborasi intensif dengan pelaku industri dalam pembaharuan SKKNI, serta penyusunan peta okupasi umum dan *industry-specific*
 - b. Peningkatan kompetensi dan kemampuan tenaga kerja bidang TIK/digital dengan memanfaatkan program *Digital Talent Scholarship* untuk 300.000 peserta pelatihan.
 - c. Pemberian beasiswa S2/S3 bidang digital kepada 1.000 penerima
 - d. Pengenalan TIK bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan dasar penggunaan dan pemanfaatan TIK.
 - e. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas lembaga pelatihan dan sertifikasi bidang TIK/digital.
2. Peningkatan Kompetensi dan kemampuan ASN dan Umum Bidang komunikasi dan informatika.
3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Kominfo
 - a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Kominfo melalui Sekolah Tinggi Multi Media;
 - b. Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
 - c. Peningkatan sumber daya penyelenggaraan pendidikan tinggi.

C. Indikator Kerja

Berdasarkan Sasaran Program tersebut diatas dirumuskan indikator kinerja utama seperti di bawah ini:



SASARAN STRATEGIS (SS) KEMENTERIAN

Program Dukungan Manajemen

SP 1: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BLSDM yang Bersih dan Efisien

SASARAN STRATEGIS (SS) BADAN LITBANG SDM



Gambar 2.2 Sasaran Strategis dan Target Kinerja Badan Litbang SDM 2020-2024

D. Perjanjian Kinerja

Untuk menjalankan Rencana Strategis, Kementerian menyusun Perjanjian Kinerja yang bersifat tahunan untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis 5 Tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Dari Renstra Kementerian, dilakukan cascading menjadi Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM. Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, secara rinci adalah sebagai berikut:

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2022
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	1. Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G	11.661 Desa/Kelurahan (Kumulatif)
		2. Persentase (%) Rancangan Kebijakan penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan broadband sebesar 90 MHz	100%
2	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital	75% (196.565.321 dari 262.087.095 Orang)
3	Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital	1. Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK	5.500.000 Orang
		2. Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	202.675 Peserta
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	73%
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80 (skala 1-100)

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022

Apabila diturunkan dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika, maka Badan Litbang SDM mendukung Sasaran Strategis 3, “Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital” dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2., “Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital” dengan target 202.675 Peserta.

Untuk memenuhi target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Menteri Kominfo, maka disusunlah target Indikator Sasaran Program (IKSP) Badan Litbang SDM sesuai target Menteri yang terdiri atas IKSP 1.1. dengan target 200.000 Jumlah Peserta Pelatihan Digital Skill (186.000 peserta DTS dan 14.000 Peserta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan IKSP 1.2 dengan target 2.675 Peserta ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial.

Berangkat dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika, disusunlah

Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2022 yang merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji kinerja Badan Litbang SDM yang jelas dan terukur selama tahun 2022 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2022 merupakan implementasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Kementerian. Tujuan perjanjian kinerja ini adalah untuk menjadi tolak ukur kinerja Badan Litbang SDM sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar pemberian *reward* atau penghargaan serta sanksi atau *punishment*.

Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2022 yang ditandatangani pada bulan Januari 2022 oleh Kepala Badan Litbang SDM (Pihak Pertama) dan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai atasan langsung (Pihak Kedua) memiliki 3 (tiga) Sasaran Program dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program yang dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2022
1 Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Jumlah Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> a. SDM Umum (Termasuk Kawasan Prioritas) b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	200.000 Peserta a. 186.000 Peserta b. 14.000 Peserta
	2. Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial	2.675 Peserta ASN
	3. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/digital yang Lulus Tepat Waktu	90% (dari 134 Mahasiswa)
2 Tercapainya target PNBP Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100% (Rp.19.309.000.000,-)
3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80% (skala 1-100)

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022

Untuk mencapai target kinerja Badan Litbang SDM tahun 2022, rencana kerja dilakukan melalui 5 Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta Pelatihan *Digital Skill: SDM Umum (Termasuk Kawasan Prioritas) dan Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)*

Pembangunan ekosistem TIK untuk menuju Tranformasi Digital tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang menghubungkan Sabang hingga Merauke. Pembangunan infrastruktur akan menjadi tidak optimal apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan atau memanfaatkan disrupsi teknologi yang ada terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, Pengenalan TIK sebagai bentuk pelatihan tingkat dasar/*basic*, pelatihan dan/ atau sertifikasi DTS sebagai pelatihan tingkat menengah dan mahir (*Digital Leadership Academy*) hadir sebagai lompatan yang efektif untuk mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki tanah air dengan membekali angkatan kerja muda dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan keahlian spesifik di bidang TIK untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pelatihan dan sertifikasi tema-tema bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang unggul dan relevan dengan kebutuhan industri kepada calon tenaga kerja dan calon *entrepreneur*; dan
 2. Menyiapkan kebutuhan SDM Talenta Digital dalam mendukung transformasi digital Indonesia menuju industri 4.0.
- 2. Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial**

Tujuan indikator ini adalah memfasilitasi pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan agar dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 jenis pelatihan yang dilaksanakan yakni Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial yang dilaksanakan di Pusdiklat dan BPPTIK.

Pelatihan Teknis Bidang TIK adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan kompetensi teknis di bidang TIK yang terkait dengan pekerjaan ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan dapat dilaksanakan secara berjenjang.

Pelatihan Fungsional adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.

Pelatihan manajerial adalah pelatihan untuk pengembangan kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial ini meliputi pengetahuan terhadap sistem manajemen dan organisasi, dasar-dasar perencanaan, pengendalian internal, perkembangan teknologi informasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, komunikasi efektif dan kepemimpinan. Diklat manajerial juga termasuk Diklat Latsar CPNS baru penerimaan tahun 2022.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah Pendidikan dan pelatihan dalam masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil profesional yang berkarakter berlandaskan pada *core values* ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.⁽²²⁾

22. https://lan.go.id/?page_id=1872

3. Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu

Dalam rangka menciptakan SDM nasional bidang kominfo yang kompeten, handal dan profesional serta berdaya saing tinggi melalui pendidikan formal, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan beasiswa S2 dalam negeri dan luar negeri bagi para ASN di seluruh Indonesia, beasiswa luar negeri untuk masyarakat umum yang bergerak dibidang kominfo, beasiswa S2 internal untuk ASN Kementerian Kominfo, serta beasiswa S3 dalam negeri untuk Dosen di Kementerian Kominfo.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan Penerima beasiswa bidang Kominfo menyelesaikan studinya sesuai masa studi normal untuk kembali berkontribusi kepada unit kerja maupun instansinya masing-masing dengan mengimplementasikan wawasan yang diterima baik secara formal dan informal selama menjalani perkuliahan pascasarjana.

4. Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau peminfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁽²³⁾

Realisasi PNBP Badan Litbang SDM bersumber dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK).

5. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

23. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



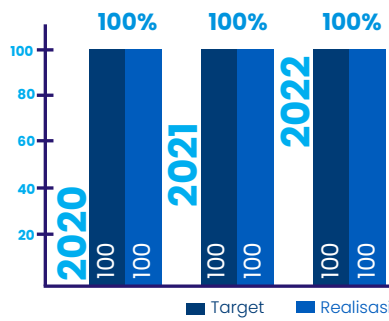
A. Capaian Kinerja Organisasi

Proyek Prioritas	Indikator	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
ProP: Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional	50.000	58.166	116,23	50.000	123.412	246,82	50.000	242.862	485,72%
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Profesional	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang memperoleh Pelatihan dan Sertifikasi (termasuk Lokus Kawasan Prioritas)	50.000	58.116	116,23	50.000	123.412	246,82	50.000	242.862	485,72%
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) Penerima Beasiswa S2/S3 yang lulus tepat waktu	90%	87,6%	97,33%	90%	85,71%	95,22%	90%	63,43%	70,48%
ProP: Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pengenalan TIK	2.000	7.628	381,4	2.200	8.758	398,09	2.500	6.707	268,28%
Pengenalan TIK kepada Masyarakat	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (termasuk lokus kawasan prioritas)	2.000	7.628	381,4	2.200	8.758	398,09	2.500	6.707	268,28%
ProP: Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	1 kajian	1 kajian	100	1 kajian	1 kajian	100	1 kajian	-	-
Kajian Strategis Penerapan Sistem <i>Big Data</i> Pemerintah	Jumlah Kajian Strategis Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah	1 kajian	1 kajian	100	1 kajian	1 kajian	100	1 kajian	-	-

Tabel 3.1 Capaian Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo Dalam RPJMN

SS.06

Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis

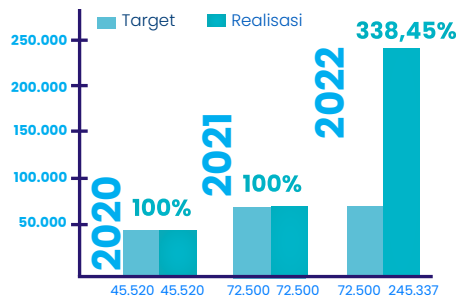


IKSS.07

Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK

SS.07

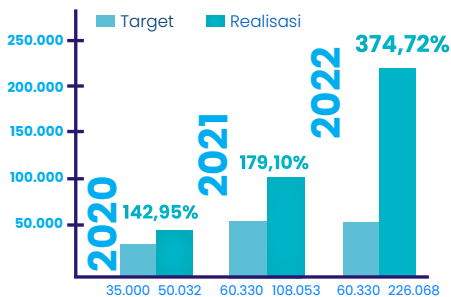
Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital



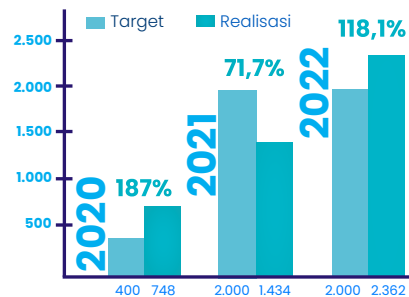
IKSS.02

Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital:

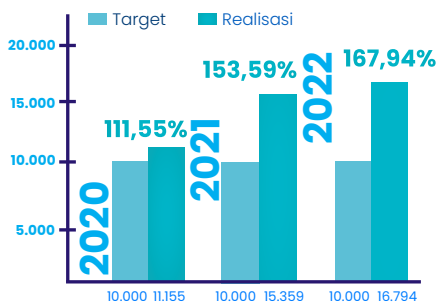
a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) :



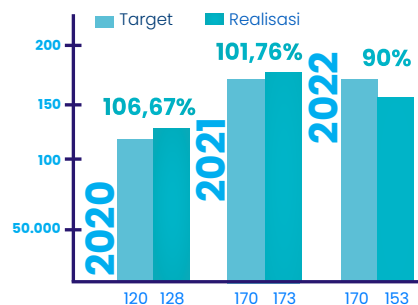
b. ASN



c. Sertifikasi SKKNI



d. Beasiswa S2/S3



Tabel 3. 2 Capaian Badan Litbang SDM Dalam Renstra Kementerian Kominfo

Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

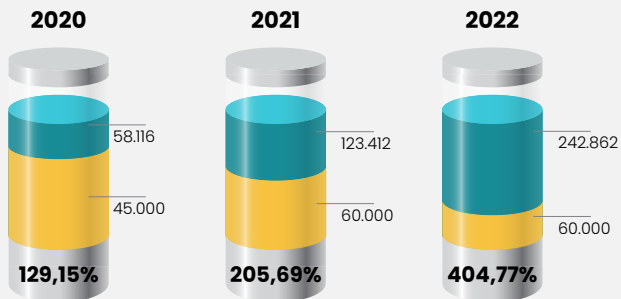
SP.05

Meningkatnya kompetensi dan kemampuan SDM Nasional bidang TIK

IKP.01

Jumlah peserta pelatihan *digital skill**
a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas)
b. SKKNI

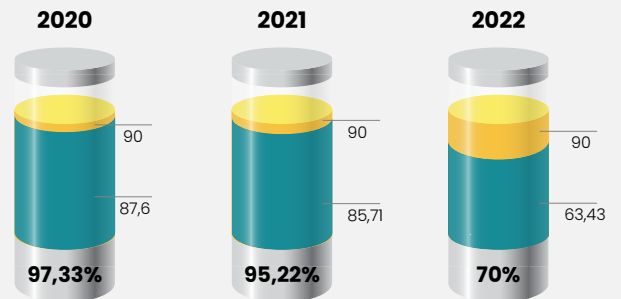
Target
Realisasi



IKP.02

Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/digital yang lulus tepat waktu

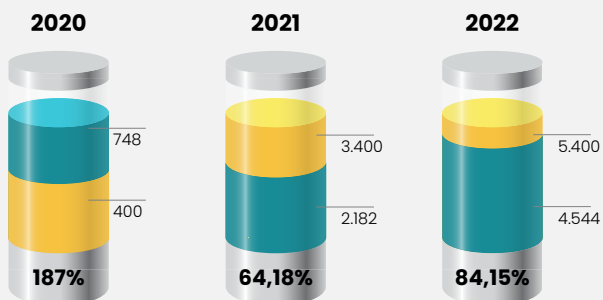
Target
Realisasi



IKP.03

Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif)

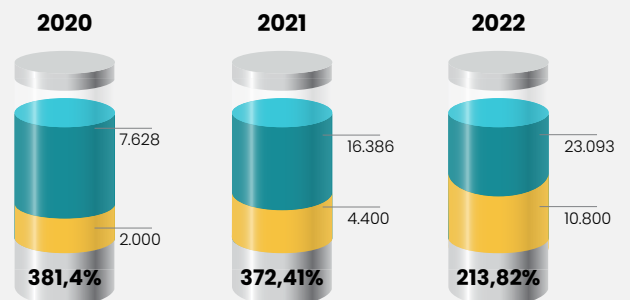
Target
Realisasi



IKP.04

Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK* (kumulatif)

Target
Realisasi



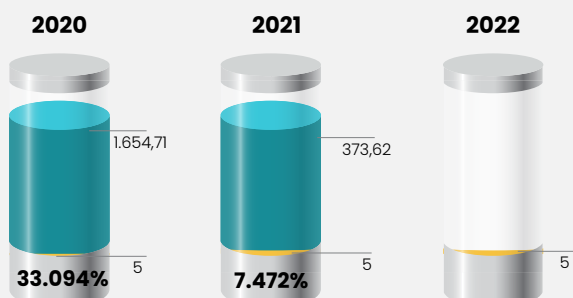
SP.06

Meningkatnya kualitas riset dan penelitian bidang TIK

IKP.01

Persentase (%) peningkatan jumlah sitasi jurnal ilmiah terbitan Balitbang

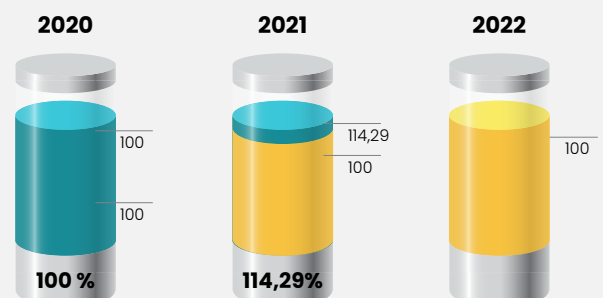
Target
Realisasi



IKP.02

Persentase (%) hasil riset dan penelitian yang mendukung kebijakan dan pengembangan bidang TIK

Target
Realisasi

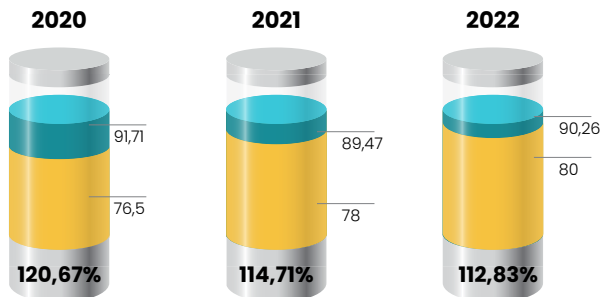


Program Dukungan Manajemen

IKP.01

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BLSDM

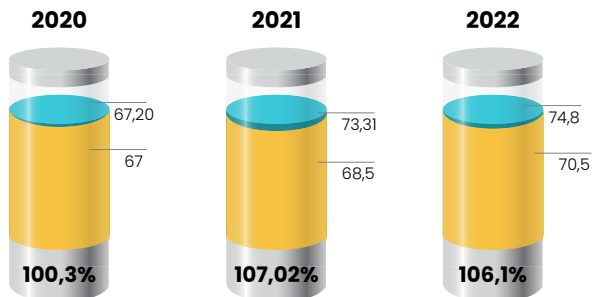
■ Target
■ Realisasi



IKP.02

Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BLSDM

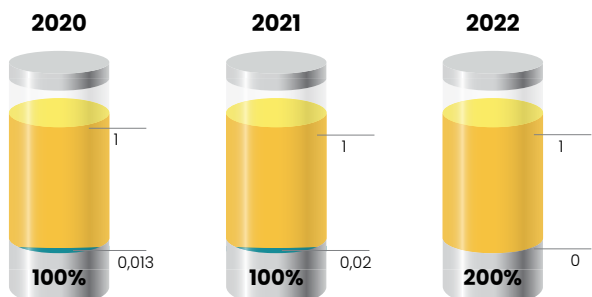
■ Target
■ Realisasi



IKP.03

Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK BLSDM Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK

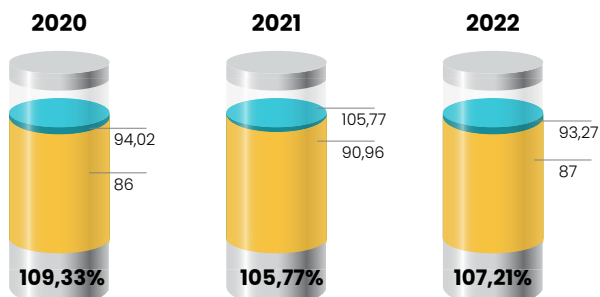
■ Target
■ Realisasi



IKP.04

Nilai Kinerja Anggaran BLSDM

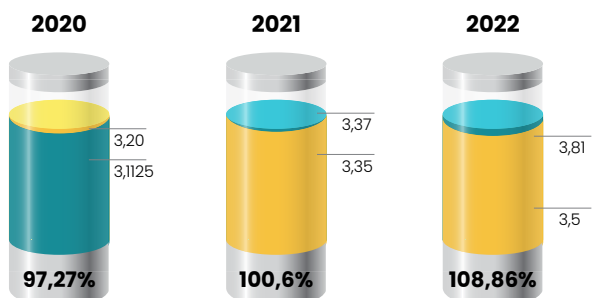
■ Target
■ Realisasi



IKP.05

Nilai SPIP Balitbang SDM

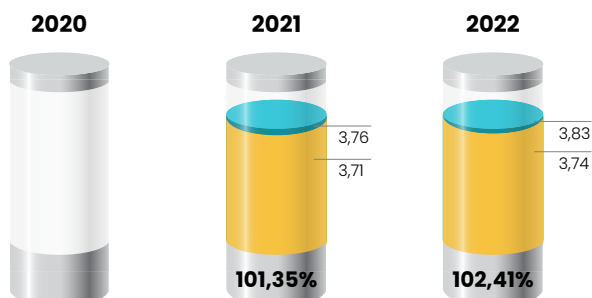
■ Target
■ Realisasi



IKP.06

Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen BLSDM

■ Target
■ Realisasi



Tabel 3. 3 Capaian Renstra Badan Litbang SDM 2020-2024

Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	2020	2021	2022
	Peserta		
TARGET	45.000	105.772	202.675
REALISASI	58.116	133.604	242.862
%	129,15	126,31	119,83

Tabel 3. 4 Capaian Badan Litbang SDM Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022

Rincian Capaian Perjanjian Kinerja

BADAN LITBANG SDM TAHUN 2022

1. Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK

1. Jumlah Peserta Pelatihan *Digital Skill*
 - a. SDM Umum (Termasuk Kawasan Prioritas)
 - b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

**TARGET
2022**

200.000 Peserta
a. 186.000 Peserta
b. 14.000 Peserta

**REALISASI
2022**

242.862 Peserta
a. 226.068 peserta
b. 16.794 peserta

**%
REALISASI
2022**

121,43%

2. Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial

2.675
Peserta ASN

2.362
Peserta ASN

88,3%

3. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK \ digital yang Lulus Tepat Waktu

90%
(dari 134 Mahasiswa)

63,43%
(85 mahasiswa lulus tepat waktu dari target 134 mahasiswa)

70,48%

2. Tercapainya target PNBPN Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**TARGET
2022**

100%
(Rp.19.309.000.000)

**REALISASI
2022**

116,37%
(Rp 22.469.829.500)

**%
REALISASI
2022**

116,37%

3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

80
(skala 1-100)

90,26%

112,83%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	TARGET/T VS REALISASI/R (%)	REALISASI TW I 2022 (%)	REALISASI TW I 2022 (%)	REALISASI TW I 2022 (%)	REALISASI TW I 2022 (%)
Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK Pengenalan TIK kepada Masyarakat	1. Jumlah Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i>	T: 200.000 Peserta R: 242.862 Peserta (121,43%)	47.405 (23,70%)	71.864 (35,93%)	88.118 (44,06%)	35.475 (17,74%)
	a. SDM Umum (Termasuk Kawasan Prioritas)	T: 186.000 Peserta R: 226.068 peserta (121,54%)	45.919 (24,69%)	66.543 (35,78%)	78.624 (42,27%)	34.982 (18,81%)
	b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	T: 14.000 Peserta R: 16.794 peserta (119,95%)	1.486 (10,61%)	5.321 (38,01%)	9.494 (67,81%)	493 (3,52%)
	2. Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial	T: 2.675 Peserta ASN R: 2.362 Peserta ASN (88,3%)	117 (5,23%)	1.028 (45,95%)	1.048 (46,85%)	169 (7,55%)
	3. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/ Digital yang Lulus Tepat Waktu	T: 90% (dari 134 Mahasiswa) R: 63,43%	19 mahasiswa lulus tepat waktu	8 mahasiswa lulus tepat waktu 5,97%	51 mahasiswa lulus tepat waktu	7 mahasiswa lulus tepat waktu
Tercapainya target PNBPN Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	T: 100% (Rp.19.309.000.000) R: 116,37% (Rp 22.469.829.500)	Rp 6.794.150.000 (35,19%)	Rp 6.007.900.000 (31,11%)	Rp 8.765.398.500 (45,40%)	Rp 902.381.000 (4,67%)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	T: 80 (skala 1-100) R: 90,26 (112,83%)	—	—	—	90,26 (112,83%)

Tabel 3. 6 Rincian Capaian Kinerja Badan Litbang SDM TA 2022 Per Triwulan

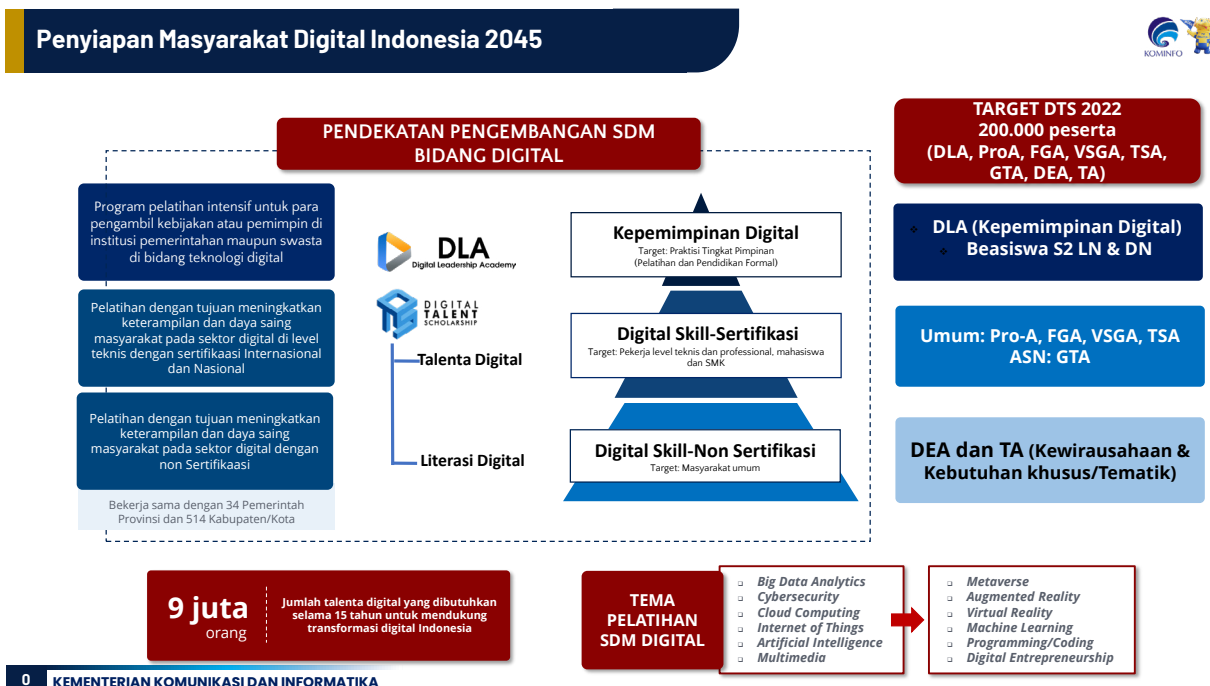
SP.1. Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK

Untuk mencapai Sasaran Program (SP) tersebut perlu didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu sebagai berikut:



Tabel 3. 7 IKSP 1.1. Jumlah Peserta Pelatihan Digital Skill

IKSP ini terdiri atas 2 kegiatan pengembangan SDM dengan jenis pelatihan, sasaran peserta serta tingkat kesulitan yang memiliki karakteristik masing-masing, yakni *Digital Talent Scholarship (DTS)* yang terdiri atas 8 Akademi termasuk VSQA. Dalam tingkatan kecakapan digital, DTS mengambil peran di level *Intermediate* dan *Basic*, yang dapat dilihat pada bagan berikut:



a. Peserta SDM Umum (Termasuk Kawasan Prioritas)

Tujuan utama program DTS adalah mengurangi kesenjangan kemampuan digital di Indonesia baik dari Indonesia bagian Barat sampai dengan bagian Timur. Indonesia perlu menyelaraskan pasokan keterampilan dengan permintaan industri yang terus berkembang dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar serta wilayah Indonesia bagian Barat namun juga melebarkan manfaat program ini ke wilayah Timur dan daerah 3T. Selain itu, kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan.

Dengan dukungan mitra kerja dan pelaksana, perumusan ulang skema dan adaptasi di masa pandemi, membuat DTS 2022 dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan 8 akademi DTS (VSGA akan dijabarkan pada poin b), yaitu:

PRO Professional Academy

1. *Professional Academy (ProA)*, target peserta yaitu untuk peserta umum bertujuan untuk mempersiapkan alih kompetensi SDM Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara *online* kepada masyarakat yang sedang bekerja agar tercipta tenaga kerja Indonesia yang lebih adaptif dan produktif. ProA juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di bidang TIK sebagai bagian dari upaya alih kompetensi dan meningkatkan daya saing. Akademi ini pada tahun 2020 disebut sebagai *Online Academy (OA)*.

DEA Digital Entrepreneurship Academy

2. *Digital Entrepreneurship Academy (DEA)*, target peserta yaitu untuk peserta umum. Sasaran program ini adalah mencetak *Digital Entrepreneur (Digipreneur)* baru.

FGA Fresh Graduate Academy

3. *Fresh Graduate Academy (FGA)*, target peserta yaitu untuk lulusan D3, D4, S1 bidang TIK, MIPA dan Teknik yang belum atau tidak sedang bekerja untuk mempersiapkan para lulusan agar memiliki kompetensi profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 agar dapat bersaing baik di industri dalam maupun luar negeri.

TA Thematic Academy

4. *Thematic Academy (TA)*, target peserta yaitu untuk peserta umum yang ditujukan spesifik pada sektor industri/kalangan tertentu, dimana kurikulumnya telah disesuaikan dengan kebutuhan industri.

GTA Government Transformation Academy

5. *Government Transformation Academy* bertujuan meningkatkan kompetensi ASN dalam mendukung akselerasi transformasi digital di Instansi Pemerintah. Akademi ini pada tahun 2020 disebut sebagai *Regional Development Academy* (RDA).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, DTS tahun 2022 juga melibatkan mitra *global technology* untuk memberikan sertifikasi internasional kepada peserta yang memenuhi syarat di akademi tertentu. Badan Litbang SDM juga bekerja sama dengan BUMN dan perusahaan swasta untuk menyalurkan peserta dari kalangan mahasiswa dalam program pemagangan setelah mengikuti pelatihan. Secara total, DTS tahun 2022 berhasil menjalin kerja sama dengan mitra sebagai berikut:

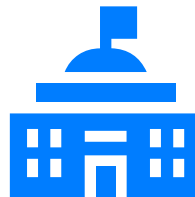
TSA Talent Scouting Academy

6. *Talent Scouting Academy* ditujukan untuk pelatihan dan pemagangan di perusahaan teknologi global bagi mahasiswa berprestasi mitra kerja sama Kominfo yang sudah mencapai tingkat akhir. Akademi ini merupakan akademi yang baru diluncurkan di tahun 2022.



58

Perguruan Tinggi;



14

Pemda (Pemkot dan Pemkab);



4

Kementerian Negara/ Lembaga (K/L)



DLA Digital Leadership Academy

7. *Digital Leadership Academy* (DLA) adalah akademi yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemimpin baik dari sektor pemerintahan, akademisi, maupun swasta untuk mendukung transformasi digital melalui perumusan kebijakan kolaboratif dan mendorong sinergisitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri digital sehingga meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia.



2

Ormas/Yayasan; dan;

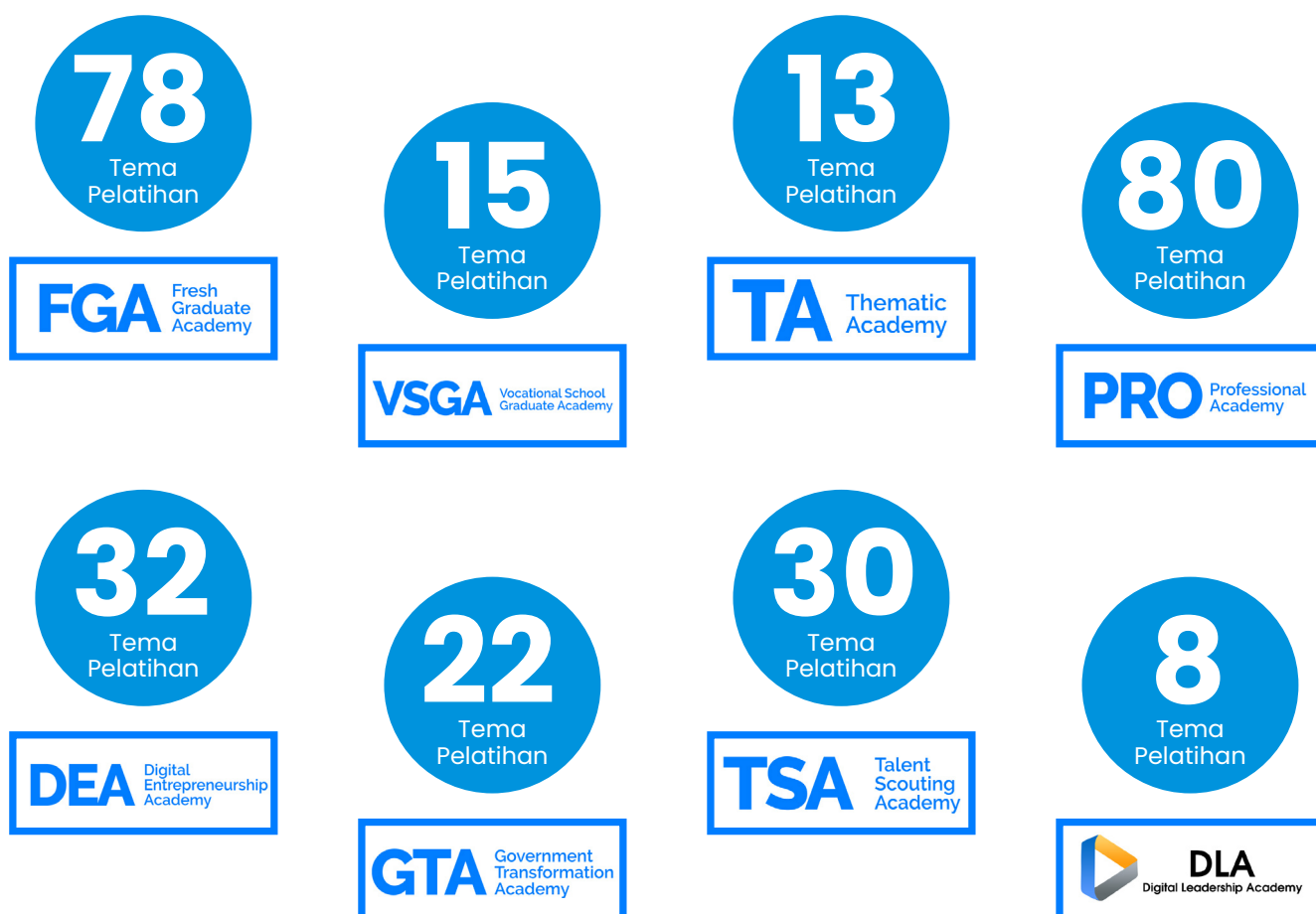


3

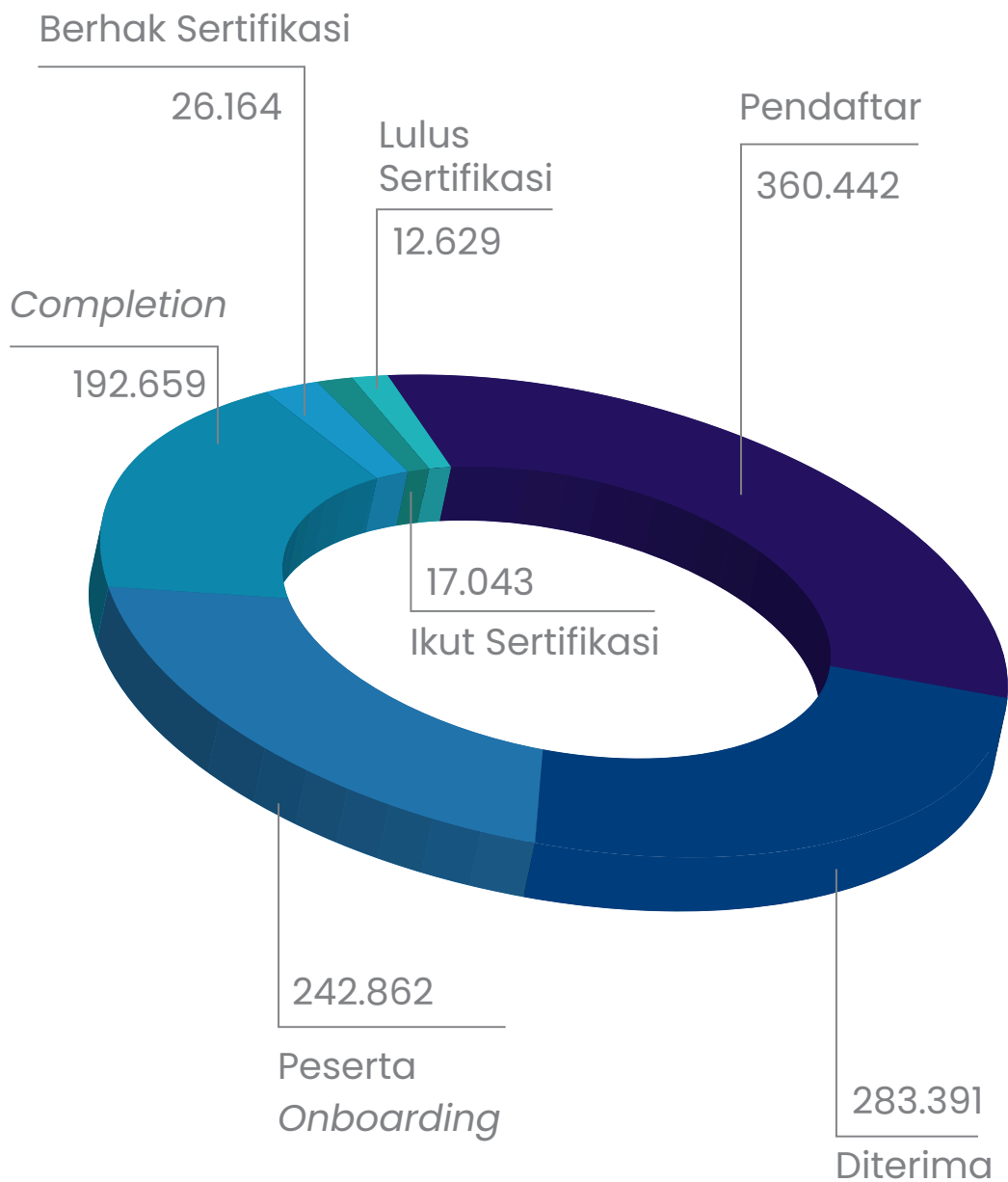
Perusahaan Lokal



Pada tahun 2022, program DTS yang dilaksanakan Badan Litbang SDM menyelenggarakan kurang lebih sebanyak 278 tema pelatihan, yang terdiri atas:



Capaian DTS Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dan UPT di lingkungan Badan Litbang SDM secara akumulasi dapat dilihat pada matriks berikut:



Gambar 3.1 Capaian DTS Tahun 2022 (termasuk VSGA)

Mulai tahun 2022, menindaklanjuti arahan Inspektorat Jenderal dan berdasarkan kesepakatan pada rapat pimpinan di lingkungan Badan Litbang SDM yang dituangkan pada Nota Dinas Kepala Badan Litbang SDM Nomor 41/BLSDM/PR.04.04/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Definisi Peserta DTS dan DLA TA 2022, definisi kriteria perekaman data berdasarkan *chart* di samping adalah sebagai berikut:



Pendaftar:

Jumlah Pendaftar yang membuat akun di laman *digitalent.kominfo.go.id* (DTS) dan *digileader.kominfo.go.id* (DLA).



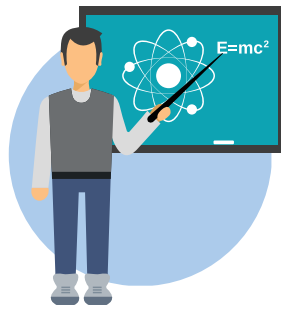
Diterima:

Jumlah Peserta lolos seleksi substansi atau *eligible* sebagai peserta dan tercantum di SK Peserta Akademi dan/atau Berita Acara Sidang Penetapan Peserta.



Peserta/Onboarding

Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan minimal 10% dari total durasi jam pelatihan.



Menyelesaikan Pelatihan/Completion:

Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan dengan ketentuan minimal dari total pertemuan sesuai ketentuan masing-masing akademi dan berhak mendapatkan Sertifikat *Completion*.



Berhak Sertifikasi Lanjutan:

Dilihat dari peserta *Completion*, berapa jumlah peserta yang skornya berhak mengikuti Sertifikasi.



Ikut Sertifikasi Lanjutan:

Jumlah peserta yang mengikuti ujian sertifikasi.



Lulus Sertifikasi (Kompeten):

Jumlah peserta ujian sertifikasi yang berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi.

b. Peserta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Vocational School Graduate Academy (VSGA) adalah salah satu bagian dari program DTS dengan target peserta lulusan SMK dan D3/D4 bidang TIK, Telekomunikasi, Multimedia, DKV, Elektro, serta yang terkait dan belum atau tidak sedang bekerja. Akademi ini sebelumnya juga dikenal dengan program sertifikasi kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan materi pelatihan serta sertifikasi peserta VSGA merupakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi SKKNI. Di akhir pelatihan, dilaksanakan sertifikasi berbasis SKKNI yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

SKKNI merupakan standar kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan jabatan yang ditetapkan. Di bidang komunikasi dan informatika, SKKNI telah diberlakukan penerapannya secara resmi melalui terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika. Pasal 5 Peraturan tersebut mengatur bahwa SKKNI Bidang Kominfo harus diberlakukan terhadap tenaga kerja industri, baik tenaga kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Asing, yang keahlian atau keterampilannya di bidang komunikasi dan informatika. Oleh karena itu, Program VSGA DTS 2022 menyiapkan talenta digital lulusan vokasi melalui pelatihan dan sertifikasi yang berbasis SKKNI bidang komunikasi dan informatika.

Program VSGA DTS yang dilaksanakan pada tahun 2022 bekerja sama dengan 53 mitra perguruan tinggi dengan sebaran mulai dari Politeknik Aceh di barat sampai Politeknik Negeri Ambon di timur, Politeknik Nusa Utara di utara sampai Politeknik Negeri Kupang di selatan. Jumlah pendaftar VSGA mencapai 33.876 orang atau sekitar 242% dari kuota

yang tersedia yaitu 14.000 orang. Tingginya keikutsertaan peserta dalam pelatihan dan sertifikasi menandakan bahwa Program VSGA masih banyak dibutuhkan dan diminati oleh angkatan kerja muda.⁽²⁴⁾

VSGA dilaksanakan untuk membekali para lulusan SMK dan lulusan pendidikan vokasi dengan pelatihan dan sertifikasi kompetensi dengan tujuan meningkatkan kompetensi para lulusan SMK sehingga siap bekerja. Kesenjangan yang cukup besar antara kondisi lulusan pendidikan TIK dan kompetensi yang dibutuhkan di industri juga turut melatarbelakangi eksistensi VSGA. Secara khusus tujuan program pelatihan VSGA DTS 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan pelatihan vokasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Mengurangi tingkat pengangguran di bidang Komunikasi dan Informatika melalui pengembangan ekosistem ekonomi digital yang kompetitif;
3. Mempercepat alih kompetensi (*upskilling dan reskilling*) SDM masyarakat Indonesia yang diakibatkan perubahan jenis pekerjaan dalam Revolusi Industri 4.0; dan
4. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat melalui pelatihan, bimbingan teknis dengan pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19.

24. Laporan Tahunan Program Vocational School Graduate Academy Digital Talent Scholarship Tahun 2022, hal. ii

Manfaat pelatihan VSGA DTS 2022 antara lain:

1. Meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja muda bidang Komunikasi dan Informatika; dan
2. Meningkatnya daya saing bagi angkatan kerja muda bidang Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan kajian Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019, pada tahun 2020 diproyeksikan lulusan TIK di Indonesia berjumlah 430.000 orang, sedangkan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja TIK sebanyak 320.000 orang. Angka tersebut mengesankan Indonesia mengalami *over supply* tenaga kerja TIK, tetapi yang perlu diperhatikan adalah angka kebutuhan tersebut hanya mempertimbangkan kuantitas, sedangkan dari segi kualitas, bisa terdapat *gap (mismatch)* antara kebutuhan industri dengan sumber daya dari lembaga pendidikan. *Gap* tersebut bisa disebabkan *gap* ketidakcocokan kualitas atau *gap* ketidakcocokan bidang. Diprediksikan pula bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta tenaga kerja terampil untuk transformasi digital selama 15 (lima belas) tahun ke depan. Apabila tidak bisa terpenuhi, akan terjadi kekurangan tenaga ahli dari Indonesia (*skills shortage*) yang akan berdampak pada situasi ekonomi domestik.⁽²⁵⁾

Metode pelaksanaan pelatihan VSGA DTS 2022 menggunakan 2 (dua) tipe, yaitu:

1. *Offline* (luring/tatap muka) dilaksanakan melalui pelatihan selama 3 hari dengan durasi 24 jam pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi selama 2 hari.
2. *Online* (daring), dalam 2 bentuk yakni:
 - a. 67 jam pelatihan, mencakup *live session/synchronous* (28 jam pelatihan) dan *self-paced learning/asynchronous* (39 jam pelatihan); dan

- b. 90 jam pelatihan, mencakup *live session/synchronous* (30 jam pelatihan) dan *self-paced learning/asynchronous* (60 jam pelatihan).

Pelaksanaan *live session* pada pelatihan VSGA daring menggunakan platform video conference, sedangkan untuk *self-paced learning* peserta menggunakan *Learning Management System (LMS)* Kementerian Kominfo. Melalui LMS, Peserta dapat mengakses bahan ajar, kuis, dan tugas proyek yang diberikan oleh pengajar. Peserta yang menyelesaikan pelatihan daring, berhak untuk mengikuti uji kompetensi/sertifikasi secara daring.

Dalam rangka penyamaan persepsi antara penyusun kurikulum, silabus, dan bahan ajar dengan para pengajar, maka dilakukan *Training of Trainer (ToT)* untuk kedua model pelatihan (daring dan luring). ToT juga dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan calon pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran serta agar materi yang disampaikan oleh pengajar pada setiap perguruan tinggi pelaksana tetap mengacu dari sumber materi yang sama. Meskipun pada pelaksanaannya pengajar diberikan keleluasaan untuk memperkaya materi dengan tidak mengubah inti materi yang sudah ada.

Dari target 14.000 peserta yang direncanakan, program ini berhasil menghasilkan 12.679 calon tenaga kerja terlatih yang berhasil menyelesaikan pelatihan berbasis kompetensi (mendapatkan *certificate of completion*) dari 16.794 peserta *onboarding* dan menghasilkan 9.570 jumlah calon tenaga kerja yang berhasil dinyatakan kompeten dengan mendapatkan sertifikat kompetensi (*certificate of competence*).

25. *Ibid*, hal. 4

Data Peserta DTS per Akademi

Akademi	Target	Pendaftar	Diterima	Peserta/ Onboarding	Menyelesaikan Pelatihan/ Completion	Berhak Sertifikasi Lanjutan	Ikut Sertifikasi Lanjutan	Lulus Sertifikasi/ Kompeten
FGA	25.000	43.996	35.850	28.496	19.692	7.266	3.299	1.731
VSGA	14.000	32.947	18.123	16.794	12.679	12.679	11.449	9.570
TA	38.000	68.509	53.936	47.579	35.380	304	283	259
PRO A	35.000	47.260	46.776	38.637	22.893	4.300	912	252
DEA	56.800	125.968	90.650	74.904	73.803			
GTA	25.300	28.633	27.284	25.645	18.899			
TSA	5.500	12.063	10.741	10.244	8.779	1.615	1.100	817
DLA	400	1.066	571	563	534			
Total	200.000	360.442	283.931	242.862	192.659	26.164	17.043	12.629

Sebaran Peserta DTS Berdasarkan Daerah /Wilayah Kerja BBPSDMP dan BPSDMP

BBPSDMP Kominfo Medan

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Kepulauan Riau
6. Kalimantan Barat
7. Kalimantan Utara

Jumlah Peserta
Onboarding

11.317

BBPSDMP Kominfo Makassar

1. Sulawesi Selatan
2. Sulawesi Tenggara
3. Nusa Tenggara Timur
4. Maluku
5. Maluku Utara
6. Papua
7. Papua Barat

Jumlah Peserta
Onboarding

10.055

BPSDMP Kominfo Jakarta

1. DKI Jakarta
2. Sumatera Selatan
3. Bangka Belitung
4. Jambi

Jumlah Peserta
Onboarding

5.865

BPSDMP Kominfo Bandung

1. Jawa Barat
2. Lampung
3. Banten
4. Bengkulu

Jumlah Peserta Onboarding

5.989

BPSDMP Kominfo Yogyakarta

1. Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Jawa Tengah
3. Bali

Jumlah Peserta Onboarding

6.091

BPSDMP Kominfo Surabaya

1. Jawa Timur
2. Nusa Tenggara Barat

Jumlah Peserta Onboarding

8.175

BPSDMP Kominfo Banjarmasin

1. Kalimantan Selatan
2. Kalimantan Tengah
3. Kalimantan Timur

Jumlah Peserta Onboarding

6.816

BPSDMP Kominfo Manado

1. Sulawesi Utara
2. Sulawesi Tengah
3. Gorontalo
4. Sulawesi Barat

Jumlah Peserta Onboarding

5.201

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Dari perhitungan realisasi kinerja di atas, dapat diperhitungkan bahwa perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja IKSP Jumlah Peserta Pelatihan *Digital Skill* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Peserta Pelatihan Digital Skill 2022} = 242.862 \text{ peserta}}{\sum \text{Target Peserta Pelatihan Digital Skill 2022} = 200.0000 \text{ peserta}} \times 100\% = 121,43\%$$

Jumlah peserta DTS sebanyak 242.862 orang merupakan akumulasi dari 8 akademi DTS termasuk VSGA dengan memperhitungkan

peserta *Onboarding* yang memenuhi kriteria kehadiran minimal 10% dari total jam pelajaran (JP). Angka tersebut terdiri atas 226.068 peserta (non VSGA) dan 16.794 peserta (VSGA). Dari hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja, persentase capaian IKSP ini adalah 121,43%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Sumber dana IKSP Jumlah Peserta Pelatihan *Digital Skill* merupakan gabungan dari 8 Akademi DTS yang berasal dari Rupiah Murni (RM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kominfo.

Pagu IKSP ini sebesar Rp 434.680.001.000 dengan realisasi anggaran IKSP ini adalah Rp 408.195.506.106 (93,91%). Dengan kata lain, terdapat pagu Rp 26.484.494.894 (6,09%) anggaran yang tidak terserap. Namun, realisasi anggaran tidak menggambarkan capaian kinerja yang berhasil diupayakan. Pelaksanaan kegiatan dengan kombinasi antara daring, luring dan *hybrid* terbukti efektif menghemat anggaran dengan realisasi kinerja yang melebihi target awal.

Faktor Pendukung

✓ Berkaca pada pengalaman tahun 2020 dan 2021 serta dalam rangka mengantisipasi pandemi Covid19 yang belum usai, maka metode pelaksanaan pelatihan dan/atau sertifikasi menjadi daring dan *hybrid* masih dilaksanakan dalam rangka efisiensi waktu dan anggaran.

✓ Peralihan metode pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tidak meninggalkan tujuan dan fokus utama penyelenggaraan program/kegiatan yang menjadi prioritas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM ini. Peralihan ini justru menjadi tantangan yang memicu transformasi digital dan peningkatan literasi digital dengan jauh lebih masif dengan memanfaatkan platform rapat daring untuk menyampaikan materi pelatihan begitu juga dengan proses sertifikasi.

✓ Jalinan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah mempermudah pelaksanaan kegiatan menjaring peserta di lokasi penyelenggaraan pelatihan. Apabila target peserta belum tercapai pada tema pelatihan tertentu, maka mitra kerja sama dapat mencari peserta cadangan yang berasal dari jaringan mitra.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala





Faktor Penghambat/Kendala

- ✘ *Drop rate* peserta dalam pelatihan daring terutama bagi akademi dengan durasi pelatihan panjang seperti *Professional Academy (ProA)*.
- ✘ Kesulitan melakukan *follow up* keberlanjutan peserta daring dibandingkan pelatihan luring. Sementara itu, ketidakhadiran peserta luring biasanya disebabkan masalah kesehatan atau *force majeure*.
- ✘ *Completion rate* pelaksanaan pelatihan luring lebih besar daripada daring. Besar kemungkinan peserta lebih tertarik pelatihan luring karena terdapat fasilitas atau kompensasi yang diberikan lebih menarik.
- ✘ Kualitas akses internet tidak merata (masalah infrastruktur). Contohnya, apabila pelaksanaan pelatihan di lokasi yang lebih tinggi dari Menara BTS, maka sinyal internet tidak stabil. Kondisi ini mempengaruhi proses pendaftaran maupun sertifikasi. Mitra sertifikasi dapat menganggap peserta *failed* hanya karena *noise* saat pelaksanaan sertifikasi maupun jaringan koneksi yang tidak stabil.
- ✘ Literasi digital tidak merata, sehingga di daerah tertentu calon peserta tidak dapat melaksanakan registrasi melalui laman digitalent.kominfo.go.id karena tidak terbiasa menggunakan internet untuk keperluan pembelajaran maupun pelatihan.
- ✘ Di daerah tertentu tidak terdapat SMK TIK sesuai kualifikasi (contoh: jurusan Teknik Komputer dan Jaringan/TKJ) untuk peserta VSGA.
- ✘ Peserta tidak lanjut mengikuti sertifikasi karena sudah diterima bekerja.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Mengoptimalkan dan memaksimalkan sosialisasi pelatihan DTS kepada masyarakat sesuai segmen akademi pelatihan untuk menjadikan DTS sebagai *top of mind* program prioritas Kementerian Kominfo dan Badan Litbang SDM pada khususnya.
- Sinergi lebih intens antara Pokja Pusat dan UPT pelaksana sekaligus melibatkan mitra (Pemda, Perguruan Tinggi, dll) setempat terutama yang telah menjalin kerja sama dengan Badan Litbang SDM sehingga Para Pihak dapat saling berkontribusi sesuai skema dan ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati dalam dokumen kerja sama.
- Monitoring pelaksanaan pelatihan berbasis kerja sama dengan Pemda dan perguruan tinggi dilakukan melalui *dashboard* DTS.
- *Engagement* antara panitia pelaksana dengan peserta perlu lebih ditingkatkan untuk mengurangi *drop rate* terutama pada pelatihan daring. dapat dilaksanakan dengan memberi *give away* atau *souvenir/merchandise* DTS, *reminder* berkala sebelum *live session*, tawaran pelatihan lanjutan, penobatan *best student*, dilibatkan pada *event internasional* seperti G20 bagi peserta terpilih dan skema *reward* lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan negara.
- Menambah peserta ToT yang berasal dari internal Kominfo maupun akademisi dari perguruan tinggi agar terdapat lebih banyak pilihan instruktur tersedia sehingga pelatihan dapat dilaksanakan secara paralel untuk mengefektifkan waktu.
- Pemilihan lokasi pelatihan luring mendahulukan daerah *concern*/lokasi prioritas (*Policy Brief Pokja FGA*).
- Untuk meningkatkan *completion* dan *certification rate*, perlu dilakukan seleksi calon peserta dengan metode *Random Forest Classifier* dengan tetap memperhatikan faktor yang berpengaruh signifikan pada kelulusan (*Policy Brief FGA*). Besar kemungkinan cara ini dapat diimplementasikan juga pada akademi yang memiliki skema sertifikasi lanjutan.
- Pelaksanaan pelatihan secara luring untuk mengakomodir daerah yang memiliki akses internet terbatas.
- Perubahan lokasi pelaksanaan pelatihan apabila tidak menemukan sasaran peserta sesuai kriteria pada lokasi yang dituju.
- Peserta yang akan mengikuti sertifikasi lanjutan namun terkendala koneksi internet dapat mengikuti sertifikasi secara luring di *test centre* mitra.

Rekomendasi

1. Pelatihan dan sertifikasi DTS masih tetap akan diselenggarakan secara daring dan luring karena setelah diidentifikasi, masing-masing metode dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan. Pelaksanaan masing-masing tema dapat disesuaikan kembali dengan durasi serta pertimbangan rencana lokasi.
2. Dari hasil identifikasi kendala dan upaya tindak lanjut yang dicoba dilaksanakan, diharapkan dapat membawa perbaikan bagi pelaksanaan DTS di tahun berikutnya sekaligus untuk memenuhi beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) yang melibatkan Kementerian Kominfo untuk memenuhi target nasional.

IKSP 1.2. Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial



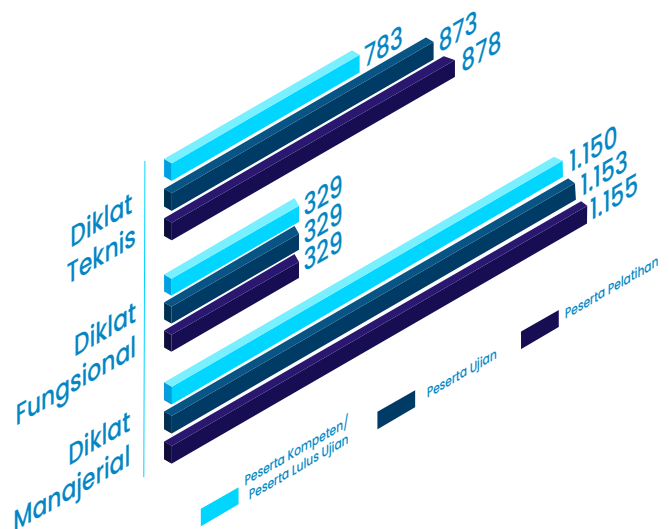
Tabel 3. 8 IKSP 1.2. Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 70 ayat 1 dan 2 bahwa setiap ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan Kompetensi. Pengembangan Kompetensi tersebut melalui Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Kursus dan Penataran.⁽²⁶⁾ Pengembangan kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun (Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

26. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

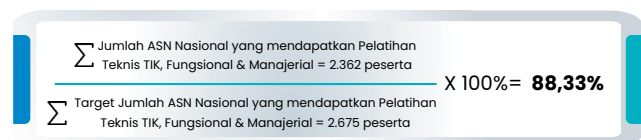
Pegawai Negeri Sipil).⁽²⁷⁾

Pelatihan ASN dilaksanakan oleh Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang secara daring, luring dan *hybrid*. Pusdiklat melayani diklat teknis, diklat fungsional, dan diklat manajerial (termasuk diklat untuk peserta internal Kementerian Kominfo). Sementara itu, BPPTIK Cikarang melayani diklat teknis. Berikut akumulasi capaian diklat teknis untuk ASN tahun 2022:



Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perhitungan persentase realisasi kinerja IKSP 1.2 ini adalah:



27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017

Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaannya, IKSP 1.2 memiliki pagu sebesar Rp 19.482.275.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.406.730.058 atau sekitar 94,48%. Dari sisi pencapaian target fisik Perjanjian Kinerja, IKSP ini memang tidak memenuhi target yang ditetapkan di awal tahun.

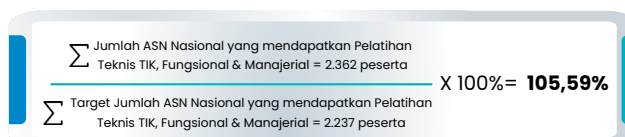
Apabila dilihat dari posisi pemutakhiran target RKAKL, target kinerja Pelatihan ASN di Pusdiklat dan BPPTIK telah berkurang menjadi 2.237 (terdiri atas: BPPTIK Cikarang 280 orang, Pusdiklat 1.957 orang) dari target semula 2.675 peserta. Namun, karena pemutakhiran dilaksanakan pada Triwulan IV TA 2022, proses revisi Perjanjian Kinerja tidak sempat dilaksanakan untuk menyesuaikan target kinerja IKSP 1.2 sehingga performanya teridentifikasi tidak memenuhi target yang ditetapkan karena target kinerja tidak direvisi sesuai kondisi aktual.

Revisi target ini dilaksanakan atas dasar Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan surat nomor:S-320/MK.2/2022 tanggal 06 September 2022 perihal Permohonan Penggunaan Pagu *Automatic Adjustment* Kemenkominfo TA 2022 sehubungan dengan surat yang diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:B-716/M.KOMINFO/ PR.01.02/08/2022 di tanggal 02 Agustus 2022. Permohonan penggunaan pagu blokir *Automatic Adjustment* ini khusus realokasi dari Program pemanfaatan TIK di Badan Penelitian dan Pengembangan SDM senilai Rp119.204.316.000,- ditujukan untuk kebutuhan anggaran Rupiah Murni Pendamping (RMP) Pembangunan Pusat Data Nasional di Ditjen Aplikasi Informatika.

Untuk proses kebutuhan revisi ini, Sekretaris Badan Litbang SDM tanggal 16 September 2022 mengirimkan Nota Dinas Nomor:1751/BLSDM.1/KU.01.02/09/2022 kepada Sekretaris Jenderal Kemkominfo cq Kepala Biro Perencanaan perihal Usulan Revisi Penggunaan Pagu *Automatic Adjustment* Badan Litbang SDM TA 2022. Adapun alasan/pertimbangan kebutuhan revisi anggaran yang diajukan secara terpusat melalui DJA Satu adalah :

- Adanya pembukaan blokir *Automatic Adjustment* di Balitbang SDM pada Program Pemanfaatan TIK sebesar Rp119.204.316.000, untuk pemenuhan kebutuhan Rupiah Murni Pendamping (RMP) pembangunan Pusat Data Nasional di Ditjen APTIKA;
- Adanya pergeseran anggaran belanja pegawai antar satker di lingkungan Badan Litbang SDM.
- Revisi ini mengakibatkan perubahan target di beberapa rincian output non prioritas nasional;**

Apabila memperhitungkan persentase aktual sesuai target yang tercantum pada RKAKL, maka performa IKSP 1.2 adalah:



Faktor Pendukung

- ✓ Renovasi sarana prasarana fasilitas pelatihan utama dan pendukung yang dikerjakan Pusdiklat tahun 2022 diharapkan menunjang keberlangsungan diklat, seperti ruang kelas, meja, kursi, LCD, *wifi*, LMS, konsumsi, klinik, fasilitas ibadah, ruang laktasi, laboratorium komputer, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Kondisi ini diharapkan mampu menarik minat dan *completion rate* pelatihan ASN.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala



*Pelatihan Penerapan Data Analysis Untuk Data Driven Governance
(5 – 9 Desember 2022)*



*Pelatihan Training of Trainer Government Transformation Academy (GTA)
dan Thematic Academy (TA) Secara Online (23 – 25 Mei 2022)*

Faktor Penghambat/Kendala

- x Belum tersedianya data akurat terkait kebutuhan kompetensi internal untuk memenuhi persyaratan minimal 20 JP per tahun bagi PNS internal Kementerian Kominfo.
- x Kuantitas SDM pengelola kegiatan belum ideal sesuai target kinerja yang harus dipenuhi karena kondisi *multitasking* yang tidak dapat dihindarkan.
- x LMS Pusdiklat sempat terkendala sehingga menghambat pelatihan daring.

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Koordinasi intens dengan satuan kerja Pembina kepegawaian internal dalam rangka identifikasi kebutuhan diklat.
- Pembagian tim pengelola kegiatan dengan efektif untuk melaksanakan kegiatan secara paralel.
- *Maintenance* berkala dan perpanjangan masa berlaku laman sertifikat LMS.

Rekomendasi

1. Perlu upaya identifikasi kebutuhan diklat internal sejak n-1 tahun berjalan sehingga perencanaan dan penganggaran diklat dapat lebih terakomodir dengan baik terutama untuk diklat yang berdurasi panjang dan proyeksi jumlah peserta yang banyak seperti diklat latsar.

2. Penggunaan fasilitas sarana prasarana perlu lebih dioptimalisasi untuk meningkatkan kenyamanan dan ketertarikan calon peserta diklat.
3. Tema diklat perlu disesuaikan dengan kebutuhan internal pegawai Kementerian Kominfo baik berstatus ASN maupun non ASN. Apabila Widyaiswara internal belum memiliki kompetensi terhadap tema tertentu (misalnya terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah) maka dapat mengundang Widyaiswara eksternal

IKSP 1.3. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu



Tabel 3. 9 IKSP 2.1. Persentase (%) Hasil Riset dan Penelitian yang Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang TIK

Dalam rangka menciptakan SDM nasional bidang kominfo yang kompeten, andal dan profesional serta berdaya saing tinggi melalui pendidikan formal, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan beasiswa S2 dalam negeri dan luar negeri bagi para ASN di seluruh Indonesia, beasiswa luar negeri untuk masyarakat umum yang bergerak di bidang

kominfo, beasiswa S2 internal untuk ASN Kementerian Kominfo. Program beasiswa dalam negeri diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia termasuk yang telah menjalin kerja sama melalui program DTS. Apabila dilihat pada piramida tingkat kecakapan digital, maka peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan formal pascasarjana merupakan bentuk pengembangan SDM pada tingkat lanjutan/*advance*.

Karakteristik IKSP 1.3. ini adalah mengidentifikasi tingkat kelulusan mahasiswa penerima beasiswa sesuai masa studi normal yakni antara 3-4 semester dari intake atau penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 atau 2021.

Berikut daftar mitra perguruan tinggi tujuan studi dimaksud:

Beasiswa S2 Informatika

Program Beasiswa S2 Bidang Informatika bekerjasama dengan 5 (lima) Perguruan Tinggi. Kerja sama dengan Universitas Padjadjaran merupakan kerja sama yang baru saja dijajaki pada Triwulan IV tahun 2022. Berikut rekap prodi dan perguruan tinggi yang menjalin kerja sama beasiswa jurusan Informatika, yaitu:

Perguruan Tinggi							
Fakultas	Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI)	Teknik Universitas Indonesia (UI), Departemen Teknik Elektro	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI – ITB)	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI – ITB)	Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Departemen Teknik Elektro	Hukum
Program Studi	Magister Teknologi Informasi (MTI)	Magister Manajemen Keamanan Jaringan Informasi (MKJI)	Magister Teknik Elektro Opsi Layanan Teknologi Informasi (LTI)	Magister Teknik Elektro Opsi Rekayasa dan Manajemen Keamanan Informasi (RMKI)	Magister Teknologi Informasi (MTI) e-Government	Magister Bidang Keahlian Telematika Pengelola TIK Pemerintahan (PeTIK)	Magister Ilmu Hukum Kekhususan Regulasi Digital

Tabel 3. 10 Program Studi Beasiswa S2 Informatika

Beasiswa S2 Komunikasi

Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi, yaitu:

























Perguruan Tinggi							
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI)	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM)	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (UNS)	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair)	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand)	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU)	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas)
Program Studi	Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi	Media Komunikasi	Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi

Tabel 3. 11 Program Studi Beasiswa S2 Komunikasi

Beasiswa S2 Luar Negeri

Program studi, perguruan tinggi dan negara tujuan program beasiswa S2 luar negeri yang mahasiswanya akan lulus pada tahun 2022.

Target IKSP ini adalah kelulusan mahasiswa penerima beasiswa tepat waktu sesuai masa studi normal yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing yaitu sebanyak 134 orang dengan memperhitungkan mahasiswa *intake* 2020 dan 2021 dengan masa studi normal maupun yang mendapatkan perpanjangan masa studi akibat pandemi Covid19.

Country	University	Course	Dalam Negeri Bidang Komunikasi	Dalam Negeri Bidang Informatika	Luar Negeri
	Tsinghua University	Master of Public Administration in International Development (MID)			
	International Institute of Information Technology Bangalore (IIIT-B)	MSc in Digital Society			
	University of Twente	MSc in Communication Science			
	Erasmus University Rotterdam	MSc in Business Information Management			
	The Hague University of Applied Sciences	Master in International Communication Management			
	Groningen University	MSc in Marketing, Digital Business Focus Area			
			Kelulusan 41 orang Target 68 orang	Kelulusan 37 orang Target 66 orang	Kelulusan 7 orang Target 7 orang

Tabel 3. 12 Program Studi Beasiswa S2 Luar Negeri

Perguruan Tinggi	Target	Jumlah Lulus Tepat Waktu	
KOMUNIKASI			
UNAIR		3	
UI		2	
UNHAS		8	
UNAND		5	
UNS		1	
UGM		9	
USU		6	
Internal		3	
Perpanjangan Covid		5	
INFORMATIKA			
ITS		5	
UI MTI		8	
UI MKJI		8	
UGM MTI		3	
UGM MKIK		9	
ITB		9	
Perpanjangan Covid		1	
Luar Negeri			
Tsinghua - RRT			1
IIITB - India	1		
University of Twente - Belanda	2		
Erasmus University Rotterdam - Belanda	1		
The Hague University of Applied Sciences - Belanda	1		
Groningen University - Belanda	1		
TOTAL	134	85	
% Kelulusan	$85/134 \times 100\% = 63,43\%$		
% Target	$63,43/90 \times 100\% = 70,48\%$		

Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Kelulusan Penerima Beasiswa S2 Tepat Waktu Tahun 2022

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

$$\frac{\sum \text{Kelulusan Penerima Beasiswa Tepat Waktu Tahun 2022} = 85 \text{ peserta}}{\sum \text{Target Kelulusan Penerima Beasiswa Tepat Waktu Tahun 2022} = 134 \text{ peserta}} \times 100\% = \mathbf{63,43\%}$$

$$\frac{\sum \text{Peserta Pelatihan Digital Skill 2022} = 242.862 \text{ peserta}}{\sum \text{Target Peserta Pelatihan Digital Skill 2022} = 200.000 \text{ peserta}} \times 100\% = \mathbf{121,43\%}$$

Dengan target awal kelulusan tepat waktu sebesar 90%, maka persentase capaian IKSP ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Kelulusan Penerima Beasiswa Tepat Waktu Tahun 2022} = 63,43\%}{\sum \text{Target Kelulusan Penerima Beasiswa Tepat Waktu Tahun 2022} = 90\%} \times 100\% = \mathbf{70,48\%}$$

Dalam pelaksanaannya, IKSP ini memiliki pagu sebesar Rp 38.502.516.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.942.183.504 atau sekitar 82,96%. Namun apabila dibandingkan dengan karakteristik indikator kinerja yang berupa *outcome*, maka performa realisasi anggaran tersebut tidak menggambarkan secara langsung korelasi antara realisasi anggaran dan pencapaian kinerja.

Faktor Pendukung

- ✓ Dukungan pengelola beasiswa baik internal maupun eksternal (mitra perguruan tinggi) serta koordinasi rutin dan berkala dalam memantau *progress* studi penerima beasiswa.
- ✓ Pelaksanaan *sharing session* di beberapa kota melibatkan seluruh penerima beasiswa S2 bidang Kominfo yang tengah menjalani studi dengan menghadirkan Narasumber dari alumni beasiswa Kementerian Kominfo yang berhasil lulus tepat pada waktunya dapat memberikan

gambaran umum bagi mahasiswa *on going* agar dapat mempersiapkan tahapan penulisan tugas akhir dan publikasi karya tulis ilmiah yang selama ini menjadi kendala utama kelulusan. Syarat publikasi tersebut berlaku sejak adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Nomor B/323/B.B1/SE/2019 dimana lulusan program Magister Menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional.

Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala



Sharing Session di Hotel Four Point Surabaya Penerima Beasiswa ITS dan Unair



Sharing Session di Hotel Golden Tulip Balikpapan Penerima Beasiswa USU, UNS dan Unhas

Faktor Penghambat/Kendala

- x Penerima beasiswa dipanggil kembali bekerja ke instansi asal sebelum masa tugas belajar berakhir atau mendapat delegasi tugas di tengah proses studi.
- x Penerima beasiswa belum menyadari kewajiban persyaratan publikasi jurnal sebagai syarat kelulusan.
- x Penerima beasiswa tidak berhasil memenuhi persyaratan kelulusan karena Karya ilmiah penerima beasiswa belum diterima oleh jurnal tertentu yang menjadi persyaratan kelulusan masing-masing perguruan tinggi.
- x Kesulitan para penerima beasiswa dalam mendapatkan sumber/referensi/buku literasi yang ada di perpustakaan kampus di tengah kondisi pembelajaran *hybrid*.
- x Hambatan yang dirasakan mahasiswa dalam melakukan penelitian di lapangan, melakukan konsultasi dan mengatur waktu dengan kegiatan perkuliahan lainnya.
- x Dari hasil identifikasi kendala/hambatan dari kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa, berikut kendala yang dirasakan oleh mahasiswa:
 - Pergantian topik penelitian atau belum menemukan topik penelitian yang sesuai

dengan minat

- Ketersediaan data dan kendala data dari informan/partisipan/narasumber penelitian
- *Learning loss*
- Kondisi Kesehatan mahasiswa dan/atau keluarga inti
- Dosen pembimbing tidak bersedia mengadakan bimbingan online atau kurang responsif
- Persyaratan minimal terbitnya prosiding dan/atau jurnal internasional sebagai prasyarat Sidang/Ujian Akhir pada kampus tertentu

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Pemberian komponen pembiayaan tambahan untuk penerima beasiswa *on going* mulai tahun 2022 yaitu biaya publikasi ilmiah yang diberikan dengan *reimburse* dengan syarat, ketentuan dan batasan nominal.
- Monitoring secara berkala melalui *sharing session* dan monitoring laporan perkembangan studi dan diskusi rutin dengan Perguruan Tinggi yang bersangkutan terkait persyaratan jurnal dan hal-hal lainnya.
- Monitoring secara berkala melalui laporan tahunan dari Perguruan Tinggi, Memiliki wadah komunikasi dengan Perguruan Tinggi maupun dengan mahasiswa, dan monitoring secara berkala melalui *sharing session*.
- *Sharing session* yang dilaksanakan di tahun 2022 juga melibatkan alumni untuk menyampaikan *success story* tentang bagaimana proses alumni melewati tahap penulisan tugas akhir dan publikasi karya tulis ilmiah dalam rangka memberikan

gambaran kepada mahasiswa *on going*. Mahasiswa *on going* juga langsung mendapatkan tips, trik, serta bertanya secara interaktif kepada alumni.

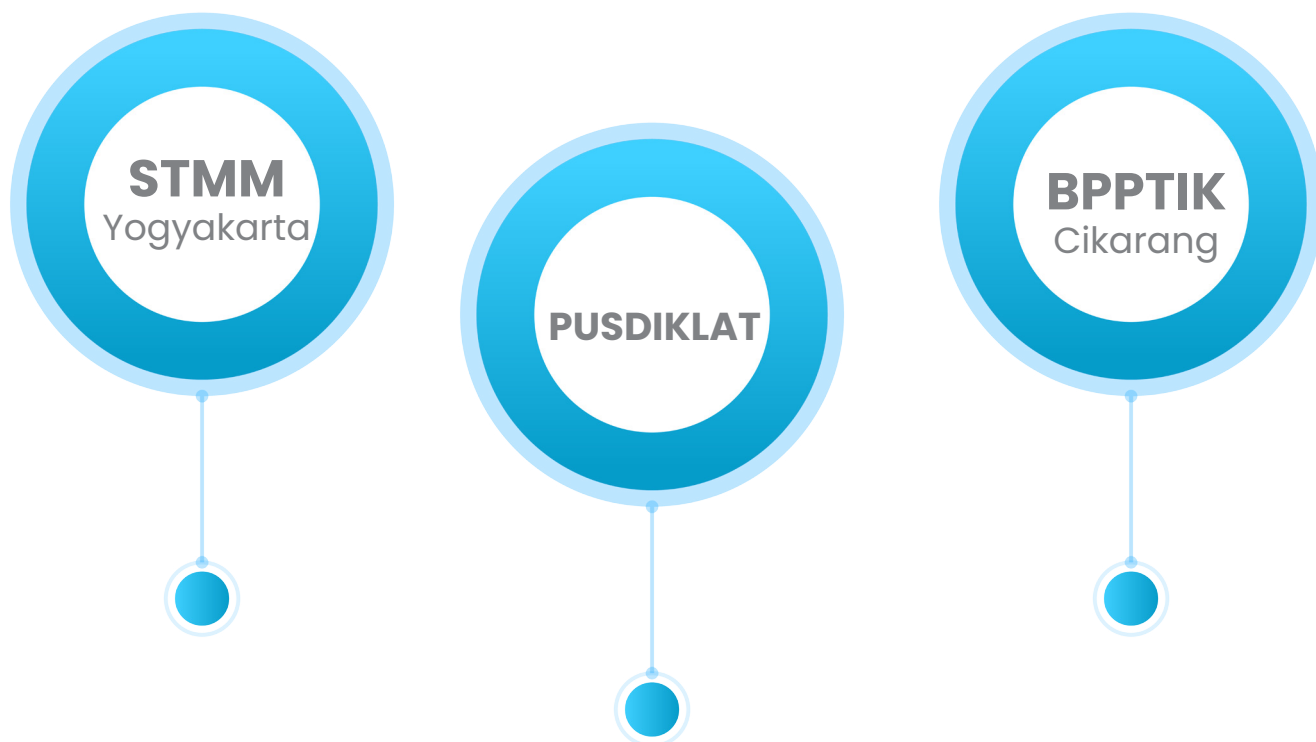
- Program studi dapat membuat *timeline* kelulusan tepat waktu sebagai acuan para penerima beasiswa dalam menyesuaikan target yang harus dilalui setiap semester terutama dengan pengalaman melewati pandemi Covid19 lebih dari 2 tahun.
- Diharapkan prodi dapat menyosialisasikan kepada penerima beasiswa bagaimana mengakses referensi/buku literasi mengingat masih sulitnya mendapatkan literasi yang dibutuhkan dari situs *online* maupun buku lainnya.
- Program studi diharapkan dapat menjembatani kesulitan yang dihadapi mahasiswa dan dosen pembimbing.

Rekomendasi

1. Himbauan untuk mitra pengelola Program Beasiswa atau pihak Perguruan Tinggi untuk kiranya dapat membuat langkah pencegahan di antaranya berupa pemberian izin atau rekomendasi perubahan metode penelitian atau media pengumpulan data dalam menghadapi pandemi Covid-19.
2. Reminder pada awal masa studi kepada penerima beasiswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa sekaligus penerima beasiswa termasuk kewajiban publikasi karya tulis ilmiah sehingga mahasiswa dapat bersiap lebih awal.
3. Untuk memperkaya literasi sekaligus peningkatan kompetensi digital, para penerima beasiswa dapat diarahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari program *Digital Talent Scholarship* (DTS) sesuai minat maupun kebutuhan instansi.

SP.2. Tercapainya Target PNBPN Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara⁽²⁸⁾. Terdapat 3 satuan kerja/ UPT yang memiliki mekanisme penerimaan PNBPN di lingkungan Badan Litbang SDM, yaitu STMM Yogyakarta, Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang.



28. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245.

Berdasarkan amanat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika⁽²⁹⁾, jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kominfo khususnya di lingkungan Badan Litbang SDM, meliputi penerimaan yang berasal dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (di Pusdiklat dan BPPTIK), penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media (di STMM) dan penggunaan sarana dan prasarana (Pusdiklat dan BPPTIK).

IKSP 2.1. Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Tabel 3. 14 IKSP 2.1. Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749

Pada tahun anggaran 2022, penerimaan PNBP dari ketiga satker/UPT tersebut berasal dari:

STMM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendidikan: Her registrasi (registrasi ulang), Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) mahasiswa baru, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tetap, dan SPP <i>variable</i> 2. Biaya pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 3. Biaya Wisuda
Pusdiklat	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan
BPPTIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi 2. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan

Tabel 3. 15 Sumber Pendapatan PNBP di Lingkungan Badan Litbang SDM

Dari sumber pemasukan PNBP di atas, berikut realisasi PNBP dari ketiga satker/UPT tersebut:

	Target	Realisasi	%
1 Pusdiklat	Rp 1.525.000.000	Rp 2.287.500.000	150%
2 STMM	Rp 17.000.000.000	Rp 19.673.887.500	115,73%
3 BPPTIK	Rp 784.000.000	Rp 508.442.000	64,85%
TOTAL	Rp 19.309.000.000	Rp 22.469.829.500	116,37%

Tabel 3. 16 Penerimaan PNBP di Lingkungan

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

$$\frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2022} = 116,37\%}{\sum \text{Target Penerimaan PNBP Tahun 2022} = 100\%} \times 100\% = \mathbf{116,37\%}$$

Faktor Penghambat/Kendala

- x Pandemi Covid19 mengurangi intensitas penyewaan fasilitas sarana prasarana untuk disewakan dan menjadi pemasukan PNBP, faktor ini menjadi penyebab utama tidak tercapainya realisasi PNBP di BPPTIK Cikarang karena banyaknya kegiatan beralih diselenggarakan secara daring dan menurunkan minat masyarakat atau instansi dalam memanfaatkan sarana prasarana BPPTIK.
- x Kurikulum dan modul yang masih mengadaptasi metode pelatihan *offline*.
- x Tidak dinamisnya jenis pelatihan di lingkungan BPPTIK yang diizinkan untuk dilaksanakan dengan mekanisme penerimaan PNBP sehingga kurang dapat mengikuti tren kebutuhan pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi Covid19.



Faktor Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala Penghambat/Kendala

- Pelatihan dialihkan ke metode *online*
- Pemasukan PNBP didapat dari Pendidikan dan/atau pelatihan secara daring.
- Koordinasi dengan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik untuk merevisi kurikulum Pranata humas dengan metode daring/*blended*.
- Melakukan diseminasi yang lebih masif untuk pelatihan teknis PNBP lainnya.
- Mengusulkan revisi peraturan tentang jenis dan tarif PNBP di lingkungan Badan Litbang SDM (bersamaan dengan unit kerja lain di Kementerian Kominfo). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang baru ditetapkan pada 7 Desember 2021 maka tarif dan pengenaan PNBP atas diklat daring telah secara resmi ditetapkan sehingga diharapkan mampu mendongkrak PNBP di lingkungan Badan Litbang SDM pada tahun anggaran 2022.



Tabel 3.17 Faktor Penghambat/Kendala dan Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Faktor Pendukung

- ✓ Pandemi Covid19 tidak berpengaruh secara langsung pada penerimaan mahasiswa baru di STMM. Dapat dilihat dari target penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV, Strata 1 dan Pendidikan Pelatihan Teknis sejumlah 2.379 orang, realisasi capaian kinerjanya melampaui target awal yakni 2.454 orang (103,15%) yang terdiri atas 505 penerimaan mahasiswa baru dan 2.061 mahasiswa *existing*.
- ✓ Penerimaan CPNS dengan formasi Pranata Humas di beberapa K/L/Pemda.
- ✓ Peralihan dari jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu sehingga memperbanyak peminat diklat JFT baik internal maupun eksternal.
- ✓ Kewajiban PNS mengikuti diklat dalam kurun waktu 1 tahun yakni minimal 20 JP sehingga kebutuhan tersebut perlu dipenuhi secara individual dan menjadi keuntungan tersendiri bagi satker/UPT penyelenggara diklat.

SP.3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran tersebut dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut :

IKSP 3.1. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)



Tabel 3. 18 IKSP 3.1. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian Nomor 6776/SJ.2/OT.03.01/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Permohonan Validasi Ulang LKE dan Bukti Dukung RB Kominfo per Oktober 2022 dan Nota Dinas Inspektur III Nomor 08/IJ.4/LHE/PW.04.05/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, hasil evaluasi pelaksanaan RB pada komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) di lingkungan Badan Litbang SDM adalah sebesar 32,77 dari bobot 36,30 atau setara dengan 90,26%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Perhitungan *indicator* ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Nilai Pemenuhan Badan Litbang SDM Tahun 2022} = 32,77}{\sum \text{Bobot Nilai Pemenuhan Tahun 2022} = 36,30} \times 100\% = 90,26\%$$

Persentase capaian IKSP ini adalah 90,28% dengan membandingkan dari target awal IKSP ini yakni 80. Maka, capaian IKSP melebihi target yang semula ditetapkan dengan persentase capaian sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Nilai RB Badan Litbang SDM Tahun 2022} = 90,26}{\sum \text{Target Nilai RB Badan Litbang SDM Tahun 2022} = 80} \times 100\% = \mathbf{112,83\%}$$

Faktor Pendukung

Komponen nilai pemenuhan pendukung nilai Badan Litbang SDM yang mendapatkan bobot nilai maksimal adalah:

- ✓ Deregulasi kebijakan (*Reform*)
- ✓ Penataan dan Penguatan Organisasi (Pengungkit, *Reform*)
- ✓ Penguatan Akuntabilitas (Pengungkit)
- ✓ Penguatan Pengawasan (*Reform*)
- ✓ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (*Reform*)

Faktor Penghambat/Kendala

Terdapat beberapa poin yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan (*area of improvement*) penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Badan Litbang SDM oleh Pokja-pokja sebagai berikut:

- x Manajemen Perubahan
- x Deregulasi kebijakan
- x Penataan Tatalaksana
- x Penataan Sistem Manajemen SDM
- x Penguatan Akuntabilitas
- x Penguatan Pengawasan
- x Peningkatan Kualitas Pelayanan

Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

- Tiap Pokja yang masih memiliki catatan perbaikan Tim Itjen hingga batas waktu penilaian oleh Tim Penilai Nasional PMPRB dari Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi

1. Pokja Manajemen Perubahan perlu memperbarui bukti dukung yang dilampirkan. Fokus perincian pada pokja ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana aksi 8 (delapan) area perubahan tahun 2022 dengan menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggung jawab, serta mendokumentasikan pelaksanaan rencana aksi tersebut dengan baik.
 - b. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui progres penyelesaian rencana aksi pada setiap periode. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui bahwa rencana aksi sudah dilaksanakan seluruh, sebagian besar, atau sebagian kecil.
 - c. Menindaklanjuti catatan-catatan hasil monitoring rencana aksi yang telah dilakukan. Tim RB Badan Litbang SDM dapat menyusun kertas kerja berupa matriks monitoring dan tindak lanjutnya untuk mempermudah dalam praktek tindak lanjut hasil monitoring.
2. Pokja Deregulasi Kebijakan perlu melakukan koordinasi dengan Pokja Deregulasi Kebijakan di level Pusat Kementerian dalam upaya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Akreditasi Program Pelatihan Bidang TIK Bagi ASN.

3. Pokja Penataan Tatalaksana perlu memperbarui bukti dukung yang dilampirkan. **Highlight** atau fokus perincian pada pokja ini adalah sebagai berikut:
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap peta proses bisnis dan SOP untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas penerapannya. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab catatan yang ditemukan pada proses evaluasi.
 - Melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kebermanfaatannya dari SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab catatan yang ditemukan pada proses evaluasi.
4. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM perlu memperbarui dan melengkapi bukti dukung yang dilampirkan. **Highlight** atau fokus perincian pada pokja ini adalah:
- Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi berdasarkan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi. Selanjutnya pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi tersebut agar menyampaikan bukti telah mengikuti berupa sertifikat atau laporan pelaksanaan tugas.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
 - Melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan pada seluruh jabatan di lingkungan Badan Litbang SDM.
 - Memanfaatkan hasil *assessment* pegawai sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
5. Pokja Penguatan Akuntabilitas perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian setiap sasaran kinerja Badan Litbang SDM agar tercapai 100% atau lebih.
6. Pokja Pengawasan perlu menindaklanjuti:
- Melaksanakan evaluasi atas pengelolaan penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan setiap tahunnya, selanjutnya menindaklanjuti catatan dari hasil evaluasi tersebut.
 - Membangun SPIP yang lebih efektif dengan menerapkan proses manajemen risiko mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, dan pemantauan triwulanan. Penerapan manajemen risiko dapat menggunakan aplikasi *mr.kominfo.go.id*.
7. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan perlu menindaklanjuti:
- Memaklumkan seluruh standar pelayanan di lingkungan Badan Litbang SDM dan mempublikasikan melalui *website* dan media sosial lainnya.
 - Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan *stakeholder*, serta memanfaatkan masukan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat.
 - Mengintegrasikan pelayanan dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.
 - Menyusun sistem pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan yang dimiliki oleh Badan Litbang SDM.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Badan Litbang SDM, rekomendasi dari Inspektorat Jenderal:

1. Tim Reformasi Birokrasi Badan Litbang SDM agar menindaklanjuti catatan-catatan di atas untuk setiap area perubahan pada komponen pemenuhan dan *reform*.
2. Tim Reformasi Birokrasi Badan Litbang SDM dan asesor agar mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi dengan menyusun dan menetapkan rencana kerja, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pada rencana kerja tersebut, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal sehingga tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi.
3. Tim Reformasi Birokrasi Badan Litbang SDM agar meningkatkan tata kelola pengarsipan dokumen data dukung RB sehingga pembangunan RB dapat dilihat dari tahun ke tahun (pembangunan berkelanjutan).
4. Tim Reformasi Birokrasi Badan Litbang SDM agar mendorong perbaikan atas area penguatan pengawasan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, dan penguatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Litbang SDM Pusat dan UPT.

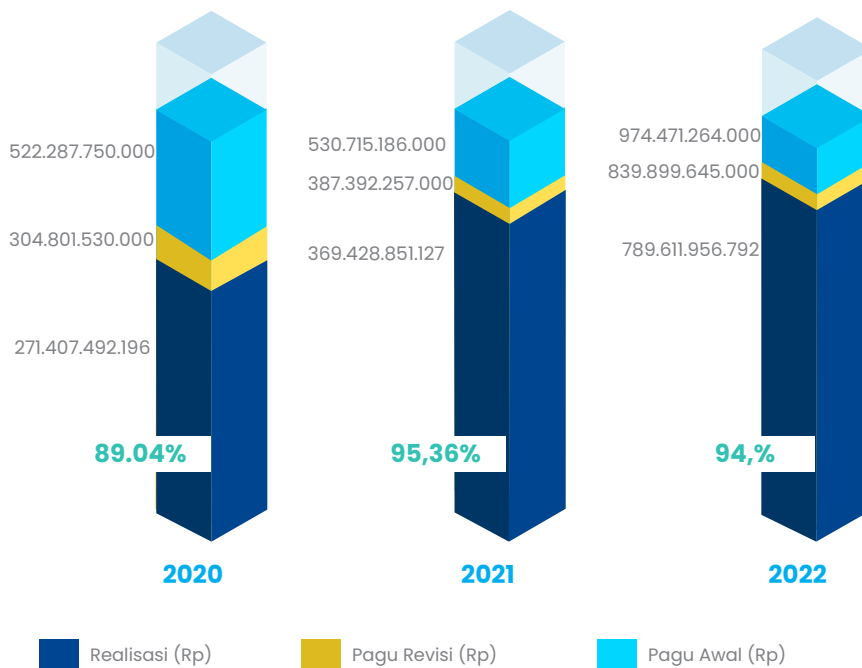
B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Badan Litbang SDM tahun 2022 sebesar Rp 839.899.645.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 789.611.956.792 (94,01%). Pagu tersebut merupakan posisi pagu terakhir setelah beberapa kali dilakukan revisi. Semula, pagu Badan Litbang SDM tahun 2022 adalah sebesar Rp 974.471.264.000. Adapun komposisi sumber dana RM adalah senilai Rp 821,616,305,000 dan sumber dana PNBP sebesar Rp 18,283,340,000 dengan realisasi dari sumber dana RM senilai Rp 775,018,320,740 (94,33%) dan realisasi dari sumber dana PNBP senilai Rp 15,911,246,590 (87,03%).

Rincian Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang Badan Litbang SDM TA 2022 dapat dilihat pada matriks berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
Belanja				
Belanja Pegawai	76.127.941.000	75.192.713.473	935.227.527	98,77%
Belanja Barang	605.850.360.000	559.703.770.894	46.146.589.106	92,38%
Belanja Modal	157.921.344.000	154.715.472.425	3.205.871.575	97,97%
Total	839.899.645.000	789.611.956.792	50.287.688.208	94,01%

Untuk dapat membandingkan performa dalam tahun anggaran Renstra dapat dilihat pada matriks kinerja anggaran Badan Litbang SDM dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022:



Tabel 3. 19 Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM s.d Tahun 2022

Selama periode berjalan sampai dengan periode Triwulan III Tahun Anggaran 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	18,525,784,000	18,525,784,000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	18,525,784,000	18,525,784,000
Belanja		
Belanja Pegawai	83,599,938,000	76,127,941,000
Belanja Barang	668,609,626,000	605,850,360,000
Belanja Modal	222,261,700,000	157,921,344,000
Jumlah Belanja	974,471,264,000	839,899,645,000

Atas pagu estimasi penerimaan di lingkup Eselon 1 Badan Litbang SDM di Tahun Anggaran 2022 diperinci sebagai berikut :

Akun	Uraian	Pagu Estimasi Penerimaan per Satuan Kerja		
		STMM	Pusdiklat	BPPTIK
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	15,000,000	25,000,000	271,000
425411	Pendapatan Ujian/ Seleksi Masuk Pendidikan	315,000,000	0	0
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	16,543,500,000	0	0
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	126,500,000	0	0
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	1,500,000,000	513,000
Total		17,000,000,000	1,525,000,000	784,000

Pagu anggaran tingkat Eselon I dari awal tahun anggaran sampai dengan periode akhir Semester II Tahun Anggaran 2022 secara agregat setidaknya mengalami 4 (empat) kali revisi pengurangan pagu anggaran. Revisi anggaran secara berturut-turut terjadi di setiap bulannya pada periode triwulan IV. Perincian proses revisi pagu anggaran lingkup Badan Litbang SDM selama periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Atas dasar Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November

2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, dilakukan proses blokir terkait pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sekurang-kurangnya 5% dari total pagu sumber dana RM, untuk kegiatan yang diprioritaskan yaitu Tunjangan Kinerja (Tunjin) yang melekat pada Gaji ke-13 dan THR, 10 akun Belanja Barang, dan kegiatan yang sudah tercantum dalam catatan halaman IV DIPA yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester I TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut maka diterbitkan Nota Dinas Sekretaris Badan Litbang SDM Nomor: 1857/BLSDM.1/KU.01.02/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 sehingga atas 11 satuan kerja di lingkup E1 BLSDM terbit dipa revisi pertama tertanggal 21 Desember 2021 dengan nilai total blokir AA adalah Rp47.809.396.000,- perinciannya adalah sebagai berikut:

	Belanja Operasional	Belanja Non OPS
Instansi Pusat	1.872.439.000	0
STMM	1.779.852.000	41,855,160,000
BBPSDMP Medan	343.070.000	0
BBPSDMP Makassar	464.000.000	0
BPSDMP Jakarta	156.000.000	0
BPSDMP Bandung	288.000.000	0
BPSDMP Yogyakarta	300.000.000	0
BPSDMP Surabaya	244.219.000	0
BPSDMP Banjarmasin	56.486.000	0
BPSDMP Manado	171.180.000	0
BPPTIK	278.990.000	0
Total	5,954,236,000	41,855,160,000

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.2/2022 tanggal 19 April 2022 hal Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022, antara lain bahwa Kementerian/Lembaga dapat terlebih dahulu menggunakan alokasi belanja pegawai yang ada dan tidak diblokir untuk pembayaran 50% Tunjangan Kinerja dan Gaji Ketiga Belas sebagai bagian dari pelaksanaan PP Nomor 16 Tahun 2022.

Untuk proses revisi blokir AA tahap I di periode 2022 ini hanya dilakukan tambahan blokir atas Belanja Barang (52) pada satuan kerja Instansi Pusat (664297) senilai Rp 1.500.000.000,- dengan terbitnya revisi DIPA kedua di tanggal 19 April 2022.

Proses revisi kedua tingkat DJA antar satuan kerja lingkup E1 Badan Litbang SDM dirinci pada tabel berikut:

No	Satuan Kerja	DIPA	Pagu 51	Pagu 52	Pagu 53
1	Instansi Pusat	Rev 1	27,754,895,000	387,004,979,000	7,917,348,000
		Rev 2	27,754,895,000	416,823,917,000	39,114,342,000
2	STMM	Rev 1	23,085,005,000	33,251,867,000	233,834,650,000
		Rev 2	23,085,005,000	35,374,967,000	172,819,523,000
3	BBPSDMP Medan	Rev 1	5,061,452,000	25,975,013,000	540,000,000
		Rev 2	5,061,452,000	24,805,773,000	540,000,000
4	BBPSDMP Makassar	Rev 1	6,309,250,000	23,915,603,000	272,180,000
		Rev 2	6,309,250,000	22,651,736,000	272,180,000
5	BPSDMP Jakarta	Rev 1	2,344,070,000	17,532,935,000	70,800,000
		Rev 2	2,344,070,000	16,923,698,000	70,800,000
6	BPSDMP Bandung	Rev 1	4,162,770,000	16,862,896,000	267,417,000
		Rev 2	4,162,770,000	16,862,896,000	267,417,000
7	BPSDMP Yogyakarta	Rev 1	3,500,000,000	17,297,031,000	428,291,000
		Rev 2	3,500,000,000	16,672,710,000	428,291,000
8	BPSDMP Surabaya	Rev 1	3,541,510,000	17,648,398,000	472,260,000
		Rev 2	3,541,510,000	16,862,388,000	472,260,000
9	BPSDMP Banjarmasin	Rev 1	1,883,164,000	16,349,168,000	127,950,000
		Rev 2	1,883,164,000	15,762,888,000	120,950,000
10	BPSDMP Manado	Rev 1	2,344,070,000	16,167,136,000	416,050,000
		Rev 2	2,344,070,000	15,654,484,000	4,416,050,000
11	BPPTIK	Rev 1	3,613,752,000	71,374,967,000	3,144,387,000
		Rev 2	3,613,752,000	71,374,967,000	3,144,387,000

Berdasarkan tabel tersebut terjadi proses pengalihan pagu anggaran belanja barang dan belanja modal dari UPT pengalihan ke anggaran satker pusat berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Litbang SDM Nomor : 59/BLSDM/KU.01.02/03/2022 perihal Pergeseran Anggaran antar Satuan Kerja di Lingkungan Badan Litbang SDM untuk Kegiatan dan Kebutuhan Prioritas Tahun 2022 yaitu:

a. Kebutuhan anggaran *Grand Launching* DTS yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2022 di Yogyakarta sebesar Rp. 11.020.219.000,-

b. Pengajuan kebutuhan anggaran dari Puslitbang Aptika IKP untuk *side event* Workshop G20: *Toolkit on Digital Skill and Digital Literacy Measurement* sebesar Rp. 502.158.000,- yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2022;

c. Pengajuan tambahan anggaran dari Puslitbang Aptika IKP untuk kegiatan Implementasi Digital *Toolkit*: Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Tahun 2022 sebesar Rp. 6.382.000.000,-

d. Pengajuan tambahan anggaran dari Puslitbang Aptika IKP untuk keperluan Dukungan Manajemen Informasi *Digital Talent Scholarship* Tahun 2022 sebesar Rp. 43.024.207.000,- yang terdiri dari Pengelolaan IT sebesar Rp. 8.427.715.000,- dan pengelolaan Media dan Publikasi program DTS sebesar Rp. 34.596.492.000,-

e. Adapun pengurangan pagu belanja modal di STMM dilatarbelakangi kondisi Pembangunan Gedung Transformasi Digital untuk pengembangan Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta yang direncanakan dimulai tahun ini, berdasarkan pertimbangan dan saran dari Dinas PUPR Yogyakarta sebaiknya dilaksanakan secara *multi years* (kontrak tahun jamak) hingga tahun 2024. Konsekuensi dari perubahan jadwal pembangunan gedung tersebut,

anggaran yang sudah dialokasikan di STMM akan digeser untuk Keperluan renovasi di Pusdiklat, Sekretariat dan Pusbang/Puslitbang.

f. Pada tahapan proses Revisi Kedua di tanggal 19 April 2022 ini juga dilakukan Blokir atas pagu anggaran KRO 4498.PBO.001 Kajian Kesiapan Penerapan *Big Data* Pemerintah sebesar Rp1.500.000.000,- yang akan dialihkan ke BRIN.

3. Selanjutnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, yaitu berupa penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) Belanja K/L TA 2022 dengan melakukan pencantuman pada halaman IV DIPA terhadap kegiatan dengan kriteria Sumber Dana Rupiah Murni (RM); Di luar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional; Di luar belanja Anggaran Pendidikan; Di luar belanja Perlinsos PBI, Bansos PKH, Bansos Kartu Sembako (Program untuk melindungi masyarakat miskin); Dapat mencakup Belanja Barang Non Ops yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022; Dapat mencakup Belanja Modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022.

Maka berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kominfo Nomor:760/SJ/KU.01.02/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 hal Permintaan Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Kominfo TA 2022, proses Revisi DIPA ketiga selesai dan terbit di tanggal 14 Juni 2022 hanya dilakukan oleh satker Instansi Pusat dan STMM dengan perincian sebagai berikut:

a. Total blokir AA tahap kedua adalah Rp 79.200.000.000,- dengan perincian Rp 1.999.635.000,- berasal dari belanja barang satker Instansi Pusat dan Rp 77.200.365.000,- berasal dari pagu belanja modal satker STMM.

b. Terjadi pengalihan pagu anggaran di satker STMM dari belanja barang berkurang dialihkan menjadi pagu belanja modal sebesar Rp 595.500.000,-

4. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Litbang SDM No:143/BLSDM/KU.01.02/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, diajukan proses revisi ke DJA Satu dengan mekanisme revisi sebagai berikut :

- * Pergeseran antar program;
- * Pergeseran antar Satker;
- * Pergeseran antar klasifikasi rincian *output*, komponen;
- * Pergeseran antar jenis belanja;
- * Perubahan target *output*;
- * Perubahan kantor bayar;

* Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Badan diatas, maka Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo menerbitkan surat Nomor B-1075/SJ/KU.01.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan perihal Usul Revisi Anggaran di Lingkungan Badan Litbang SDM TA 2022.

Adapun alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

1. Pergeseran anggaran antar Satker pada Badan Litbang SDM Pusat untuk optimalisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Litbang SDM TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Pergeseran Revisi			Pagu Semula	Pagu Menjadi	Alasan
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal			
Instansi Pusat	0	-16,137,671,000	-2,240,214,000	483,693,154,000	465,315,269,000	Realokasi 53 dan Belanja Barang DTS khusus TA & DEA
BPSDMP Bandung	0	70,000,000	5,033,800,000	20,727,785,000	25,831,585,000	Kebutuhan belanja sewa kantor sementara dan Belanja modal Renovasi Gedung Balai
BPSDMP Yogya	0	491,350,000	5,253,645,000	20,601,001,000	26,345,996,000	Kebutuhan belanja sewa kantor sementara, penambahan DTS TA dan Belanja modal Renovasi Gedung Balai
BPSDMP Surabaya	0	3,518,700,000	5,033,800,000	20,876,158,000	29,428,658,000	Penambahan 52 untuk DTS TA & DEA serta Belanja modal Renovasi Gedung Balai
BBPSDMP Medan	0	2,404,288,000	5,031,933,000	30,407,225,000	37,843,446,000	Penambahan 52 untuk DTS TA & DEA serta Belanja modal Renovasi Gedung Balai
BPSDMP Banjarmasin	0	3,086,580,000	5,192,962,000	17,767,002,000	26,046,544,000	Penambahan 52 untuk DTS TA & DEA serta Belanja modal Renovasi Gedung Balai
BPSDMP Manado	0	0	0	22,414,604,000	22,414,604,000	Penambahan Target <i>Output</i> Belanja Modal
BBPSDMP Makassar	0	5,759,532,000	0	29,233,166,000	34,992,698,000	Penambahan 52 untuk DTS TA & DEA serta Belanja modal Renovasi Gedung Balai
STMM	0	0	-32,094,800,000	231,279,495,000	199,184,695,000	Realokasi Belanja Modal ke satuan kerja litbang lainnya
BPSDMP Jakarta	0	70,000,000	6,181,160,000	19,338,568,000	25,589,728,000	Kebutuhan belanja sewa kantor sementara dan Belanja modal Renovasi Gedung Balai
BPPTIK	0	3,344,935,000	0	78,133,106,000	81,478,041,000	Penambahan 52 untuk DTS TA & DEA
TOTAL PAGU ANGGARAN				974,471,264,000	974,471,264,000	

2. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan *volume*/target pada beberapa RO.

3. Revisi ini tidak mengakibatkan penurunan target pada RO Prioritas Nasional secara Unit Eselon I Badan Litbang SDM.

4. Mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga, dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja.

DIPA revisi terbit pada tanggal 11 Agustus 2022 untuk 11 satuan kerja di lingkup Badan Litbang SDM atas proses realokasi antar belanja barang dan belanja modal, dengan catatan nilai pagu blokir Belanja Pegawai Rp 5.954.236.000,- Blokir Belanja Barang Rp 45.354.795.000,- dan Blokir Belanja Modal Rp77.200.365.000.

DIPA revisi terbit di tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : S-386/AG/AG.5/2022 hal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkominfo TA 2022.

5. Pada tanggal 12 September 2022 Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Propinsi D.I Yogyakarta telah mengeluarkan surat Nomor:S-1334/WPB.15/2022 hal Pengesahan Revisi Anggaran Satuan Kerja Sekolah Tinggi Multi Media MMTc Yogyakarta (059.06.432722), menindaklanjuti surat usulan revisi Anggaran dari Ketua STMM Nomor:2304/STMM.34/ KU.01.02/09/2022 dalam hal pengajuan revisi antar jenis belanja sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Nilai Revisi
Belanja Pegawai	23,085,005,000	25,869,712,000	2,784,707,000
Belanja Barang	34,779,467,000	34,233,967,000	-545,500,000
Belanja Modal	141,320,223,000	139,081,016,000	-2,239,207,000
Total DIPA	199,184,695,000	199,184,695,000	0

Proses revisi yang diajukan satker STMM langsung ke Kanwil Perbendaharaan ini terkait dengan proses Revisi DJA Satu tahap selanjutnya yang terpusat, yaitu terkait realokasi belanja pegawai. Dikarenakan satuan kerja STMM setelah melakukan perhitungan atas kebutuhan belanja pegawainya terdapat nilai minus yang besar maka diputuskan dipenuhi dari proses realokasi anggaran satuan kerjanya sendiri. Belanja barang yang dikurangi adalah pagu belanja perjalanan dinas luar negeri dan belanja barang terkait pengembangan prodi, sedangkan belanja modal yang dikurangi untuk pemenuhan minus belanja pegawai adalah berasal dari pengurangan belanja peralatan pendukung pendidikan, pengadaan AC *Central* yang batal dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 ini dengan alasan limit waktu barang impor.

6. Pada tanggal 06 September 2022 Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan surat nomor:S-320/MK.2/2022 hal Permohonan Penggunaan Pagu *Automatic Adjustment* Kemenkominfo TA 2022 sehubungan dengan surat yang diajukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:B-716/M.KOMINFO/PR.01.02/08/2022 di tanggal 02 Agustus 2022. Permohonan penggunaan pagu blokir *Automatic Adjustment* ini khusus realokasi dari Program pemanfaatan TIK di Badan Penelitian dan Pengembangan SDM senilai Rp119.204.316.000,- ditujukan untuk kebutuhan anggaran Rupiah Murni Pendamping (RMP) Pembangunan Pusat Data Nasional di Ditjen Aplikasi Informatika.

Asal Satuan Kerja	Jenis Blokir AA	Nilai (Rp)
Instansi Pusat BLSDM	Belanja Barang	42.003.951.000
STMM Yogyakarta	Belanja Modal	77.200.365.000
TOTAL		119.204.316.000

Adapun alasan/pertimbangan kebutuhan revisi anggaran yang diajukan secara terpusat melalui DJA Satu adalah:

- Adanya pembukaan blokir *Automatic Adjustment* di Balitbang SDM pada Program Pemanfaatan TIK sebesar Rp 119.204.316.000, untuk pemenuhan kebutuhan Rupiah Murni Pendamping (RMP) pembangunan Pusat Data Nasional di Ditjen APTIKA;
- Adanya pergeseran anggaran belanja pegawai antar satker di lingkungan Badan Litbang SDM;
- Revisi ini mengakibatkan perubahan target di beberapa rincian *output* non prioritas nasional;

Maka untuk proses kebutuhan revisi ini, Sekretaris Badan Litbang SDM tanggal 16 September 2022 mengirimkan Nota Dinas Nomor:1751/BLSDM.1/KU.01.02/09/2022 kepada Sekretaris Jenderal Kemkominfo cq Kepala Biro Perencanaan perihal Usulan Revisi Penggunaan Pagu *Automatic Adjustment* Badan Litbang SDM 2022.

Adapun rincian proses Revisi DIPA yang terbit di tanggal 03 Oktober 2022 adalah sebagai berikut :

Satuan Kerja	Pergeseran Revisi			Pagu Semula	Pagu Menjadi	Alasan
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal			
Instansi Pusat	1,560,000,000	-42,003,951,000	0	465,315,269,000	424,871,318,000	Penambahan 51 dan Revisi Blokir AA 52
BPSDMP Bandung	-958,000,000	0	0	25,831,585,000	24,873,585,000	Revisi kurang 51
BPSDMP Yogya	180,000,000	0	0	26,345,996,000	26,525,996,000	Revisi Penambahan 51
BPSDMP Surabaya	-101,000,000	0	0	29,428,658,000	29,327,658,000	Revisi kurang 51
BBPSDMP Medan	-549,000,000	0	0	37,843,446,000	37,294,446,000	Revisi kurang 51
BPSDMP Banjarmasin	40,000,000	0	0	26,046,544,000	26,086,544,000	Revisi Penambahan 51
BPSDMP Manado	57,000,000	0	0	22,414,604,000	22,471,604,000	Revisi Penambahan 51
BBPSDMP Makassar	-436,000,000	0	0	34,992,698,000	34,556,698,000	Revisi kurang 51
STMM	0	-50,000,000	-77,150,365,000	199,184,695,000	121,984,330,000	Revisi Blokir AA 53 dan Revisi Operasional kantor dari 52 ke 53
BPSDMP Jakarta	40,000,000	0	0	25,589,728,000	25,629,728,000	Revisi Penambahan 51
BPPTIK	167,000,000	0	0	81,478,041,000	81,645,041,000	Revisi Penambahan 51
TOTAL PAGU DIPA				974,471,264,000	855,266,948,000	

Maka berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-500/AG.AG.5/2022 hal Pengesahan Revisi Anggaran Sekretariat Jenderal dan Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2022 di tanggal 03 Oktober 2022, DIPA revisi pengurangan anggaran berkurang terbit di tanggal yang sama, dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Semula	Pagu Menjadi	Blokir AA di Revisi ke BUN	Perubahan Revisi Anggaran
Belanja Pegawai	83,599,938,000	86,384,645,000	-	2,784,707,000
Belanja Barang	671,217,340,000	628,617,889,000	42,003,951,000	-595,500,000
Belanja Modal	219,653,986,000	140,264,414,000	77,200,365,000	-2,189,207,000
Total DIPA	974,471,264,000	855,266,948,000	119,204,316,000	0

7. Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 hal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, Sekretaris Jenderal Kominfo menerbitkan Nota Dinas nomor: 1490/SJ/KU.01.01/10/2022 tertanggal 05 Oktober 2022 perihal Penyampaian Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2022 yang merinci nilai blokir di lingkup EI BLSDM yang akan di revisi senilai total Rp 5.954.236.000,-

Maka di tanggal 07 Oktober 2022, Sekretaris Badan Badan Litbang SDM mengirimkan nota dinas nomor: 2039/BLSDM.1/KU.01.02/10/2022 kepada Sekretaris Jenderal Kemkominfo

cq Kepala Biro Perencanaan perihal Revisi Penyesuaian Belanja Pegawai yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Badan Litbang SDM TA 2022 dengan pertimbangan proses revisi anggaran yaitu adanya pengurangan belanja pegawai yang berasal dari *Automatic Adjustment* Belanja Badan Litbang SDM TA 2022 sebesar Rp 5.611.166.000,- yang direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), pengurangan belanja pegawai ini masih kurang Rp 343.070.000,- dikarenakan di Satker 432680 Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Medan masih proses penetapan perubahan pejabat KPA, dan akan diusulkan kembali usulan revisi pada revisi selanjutnya setelah perubahan pejabat KPANYA ditetapkan.

Tema Revisi anggaran periode ini adalah :

- » Pembukaan pagu blokir belanja pegawai;
- » Pemotongan pagu blokir belanja pegawai;
- » Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN;
- » Revisi administrasi.

Sedangkan mekanisme revisi anggaran periode ini adalah:

- ◇ Pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran berubah;
- ◇ Pergeseran anggaran antar Klasifikasi Rincian *Output*;
- ◇ Perubahan halaman IV DIPA (Blokir);
- ◇ Ralat/Revisi rencana penarikan halaman III DIPA.

Perincian dari proses revisi tingkat kewenangan DJA per satuan kerja khusus di pagu anggaran jenis belanja pegawai adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	DIPA Semula	DIPA Revisi	Nilai Revisi Belanja Pegawai
1	Instansi Pusat	424.871.318.000	422.998.879.000	1.872.439.000
2	BPSDMP Bandung	24.873.585.000	24.585.585.000	288.000.000
3	BPSDMP Yogya	26.525.996.000	26.225.996.000	300.000.000
4	BPSDMP Surabaya	29.327.658.000	29.083.439.000	244.219.000
5	BPSDMP Banjarmasin	26.086.544.000	26.030.058.000	56.486.000
6	BPSDMP Manado	22.471.604.000	22.300.424.000	171.180.000
7	BBPSDMP Makassar	34.556.698.000	34.092.698.000	464.000.000
8	STMM	121.984.330.000	120.204.478.000	1.779.852.000
9	BPSDMP Jakarta	25.629.728.000	25.473.728.000	156.000.000
10	BPPTIK	81.645.041.000	81.366.051.000	278.990.000
TOTAL		855.266.948.000	849.312.712.000	5.339.329.000

DIPA Revisi terbit ditanggal 20 Oktober dengan nilai pagu akhir anggaran E1 BLSDM berkurang menjadi Rp 849.312.712.000,-

8. Proses Revisi kewenangan DJA kembali dilakukan tingkat Eselon 1 yang didasarkan pada nota dinas Kepala Badan Litbang SDM Nomor B-202/KOMINFO/BLSDM/KU.01.02/10/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Usulan Revisi Anggaran, dengan pertimbangan utama adalah untuk melakukan blokir anggaran belanja operasional yang terkait dengan pemindahan pegawai ke BRIN. Selain itu terjadi revisi perpindahan dari Instansi Pusat dan BBPSDM Medan, ke pagu anggaran DIPA satker BPPTIK Cikarang.

DIPA revisi terbit di tanggal 08 November 2022 dengan perincian nilai revisi per satuan kerja adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	DIPA Semula	DIPA Revisi	Nilai Blokir Anggaran
1	Instansi Pusat	422.998.879.000	410.084.149.000	6.116.063.000
2	BPSDMP Bandung	24.585.585.000	24.585.585.000	90.000.000
3	BPSDMP Yogya	26.225.996.000	26.225.996.000	346.991.000
4	BPSDMP Surabaya	29.083.439.000	29.083.439.000	665.169.000
5	BPSDMP Medan	37.294.446.000	36.951.376.000	614.907.000
6	BPSDMP Banjarmasin	26.030.058.000	26.030.058.000	0
7	BPSDMP Manado	22.300.424.000	22.300.424.000	0
8	BBPSDMP Makassar	34.092.698.000	34.092.698.000	1.156.497.000
9	STMM	120.204.478.000	120.204.478.000	0
10	BPSDMP Jakarta	25.473.728.000	25.473.728.000	423.440.000
11	BPPTIK	81.366.051.000	94.280.781.000	0
	TOTAL	849.312.712.000	849.312.712.000	9.413.067.000

9. Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, maka Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemkominfo menerbitkan nota dinas nomor 2669/SJ.1/KU.01.02/11/2022 tertanggal 28 November 2022 perihal Permohonan Reviu atas Usulan Revisi Realokasi Anggaran Blokir dari BA Kemenkominfo ke BA BUN TA 2022.

Maka sebagai tindak lanjutnya, Sekretaris Badan Litbang SDM menerbitkan Nota Dinas nomor : 2377/BLSDM.1/KU.01.02/11/2022 tanggal 29 November 2022 hal Usulan Revisi Realokasi Blokir Badan Litbang SDM ke BA BUN TA 2022, dimana diajukan revisi untuk:

- ✓ Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN;
- ✓ Pergeseran anggaran antar rincian outpun, komponen;
- ✓ Pergeseran anggaran antar kantor bayar;
- ✓ Pergeseran anggaran antar jenis belanja;
- ✓ Perubahan halaman IV DIPA;
- ✓ Perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA.

DIPA revisi kewenangan DJA untuk tingkat E1 Badan Litbang SDM terbit di tanggal 08 Desember 2022 dengan perincian perubahan revisi per satuan kerja adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja	DIPA Semula	DIPA Revisi	Nilai Revisi	Blokir Anggaran
Instansi Pusat	1.410.084.149.000	403.968.086.000	6.116.063.000	0
STMM	24.585.585.000	24.495.585.000	90.000.000	0
BBPSDMP Medan	26.225.996.000	25.879.005.000	346.991.000	0
BBPSDMP Makassar	29.083.439.000	28.418.270.000	665.169.000	0
BPSDMP Jakarta	36.951.376.000	36.336.469.000	614.907.000	0
BPSDMP Bandung	26.030.058.000	26.030.058.000	0	0
BPSDMP Yogyakarta	22.300.424.000	22.300.424.000	0	0
BPSDMP Surabaya	34.092.698.000	32.936.201.000	1.156.497.000	0
BPSDMP Banjarmasin	120.204.478.000	120.204.478.000	0	0
BPSDMP Manado	25.473.728.000	25.050.288.000	423.440.000	0
BPPTIK	94.280.781.000	94.280.781.000	0	0
Total	849.312.712.000	839.899.645.000	9.413.067.000	0

Pengurangan anggaran sebesar Rp 9.413.067.000,- adalah berasal dari revisi blokir anggaran AA dan blokir anggaran pemindahan ke BRIN, yang direvisi ke anggaran BA BUN. Sehingga revisi ini adalah yang terakhir untuk tingkat kewenangan DJA yang menyebabkan nilai DIPA E1 BLSDM menjadi Rp 839.899.645.000,-

10. Selain proses revisi pengurangan anggaran, juga dilakukan revisi tingkat kewenangan kantor wilayah perbendaharaan untuk proses pemutakhiran revisi POK dan revisi deviasi Halaman III DIPA. Proses revisi ini tidak merubah nilai pagu anggaran di masing-masing jenis belanja (dua digit) DIPA satuan kerja. Sehingga proses dipa revisi yang terbit di masing-masing satuan kerja setelah periode 08 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tanggal DIPA Revisi	
	Revisi	Tanggal
Instansi Pusat	Revisi XI	Tanggal 28 Desember 2022
BPSDMP Yogya	Revisi VIII	Tanggal 12 Desember 2022
BBPSDMP Medan	Revisi IX	Tanggal 28 Desember 2022
BPSDMP Banjarmasin	Revisi VIII	Tanggal 11 Desember 2022
BPSDMP Manado	Revisi X	Tanggal 15 Desember 2022
BBPSDMP Makassar	Revisi XII	Tanggal 13 Desember 2022
STMM	Revisi X	Tanggal 27 Desember 2022
	Revisi XII	Tanggal 19 Januari 2023
	-	-
	-	-
	Revisi IX	Tanggal 27 Desember 2022
	-	-
	Revisi XIII	Tanggal 26 Desember 2022
	-	-

PENUTUP

Badan Litbang SDM telah melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika melalui program kerja Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis Kementerian Kominfo dan Badan Litbang SDM Tahun 2020–2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2022.

Secara keseluruhan Badan Litbang SDM telah menghasilkan kinerja yang maksimal dan optimal meskipun di tahun 2022 masih terdampak pandemi Covid19. Diskresi pimpinan yang adaptif membuat seluruh jajaran Badan Litbang SDM mampu mengejar target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya melampaui target. Berikut ikhtisar capaian kinerja Badan Litbang SDM Tahun Anggaran 2022, yang dapat kami sampaikan:

1. Dari total dari 3 Sasaran Program (SP) dengan 5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), berikut *summary* performa kinerja Badan Litbang SDM untuk masing-masing IKSP:

1) Jumlah Peserta Pelatihan Digital Skill dari target semula 200.000 peserta, realisasi capaiannya mencapai 242.862 peserta sehingga persentase capaiannya adalah sebesar **121,43%**.

2) Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial, dari target semula 2.675 Peserta ASN, realisasi capaiannya mencapai 2.362 Peserta ASN sehingga persentase capaiannya adalah sebesar **88,3%**. Hal ini disebabkan

karena target IKSP ini belum disesuaikan dengan target yang tertera pada dokumen pemutakhiran RKAKL yang baru direvisi pada Triwulan III Tahun 2022.

3) Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu, dari target semula 90%, realisasi capaiannya mencapai 63,43% sehingga persentase capaiannya adalah sebesar **70,48%**.

4) Persentase (%) Realisasi Target PNPB Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dari target semula 100%, realisasi capaiannya mencapai 116,37% sehingga persentase capaiannya adalah sebesar **116,37%**.

5) Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dari target semula 80, realisasi capaiannya mencapai 90,26 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar **112,83%**.

2. Badan Litbang SDM perlu mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan performa kinerja, di antaranya melalui pematangan perencanaan program dan penyusunan anggaran dan kegiatan serta agenda kegiatan yang lebih optimal dan efisien disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala. Koordinasi yang lebih intensif dengan satuan kerja dan UPT di Kementerian Kominfo terutama dalam penyusunan kebijakan, pola pembinaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis serta perubahan *mindset* dan etos kerja SDM di lingkungan Badan Litbang SDM sehingga koordinasi dengan pihak eksternal pun akan lebih optimal untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Identifikasi dan mitigasi risiko juga perlu diidentifikasi dan secara berkala dimonitoring melalui mekanisme Manajemen Risiko.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

– Indonesia. 1997. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245.

– Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278.

– Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.

– Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.

– Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

– Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749.

– Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik*

Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96.

– Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017.

– Indonesia. 2018. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245.

– Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

– Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120.

– Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2021.c

– Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 444.

– Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 445.

Dokumen Pendukung

– *Laporan Tahunan Program Vocational School Graduate Academy Digital Talent Scholarship Tahun 2022.*

– *Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Tahun 2022.* 2022. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

– *Rencana Strategis Badan Litbang SDM Tahun 2020-2024.* 2022. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan SDM.

Internet

– Bisnis.com. 29 November 2021. "Jokowi Sebut APBN 2022 Fokus pada 6 Kebijakan Utama, Apa Saja?". Diakses 30 Januari 2023, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211129/10/1471608/jokowi-sebut-apbn-2022-fokus-pada-6-kebijakan-utama-apa-saja>.

– <https://balitbangsdm.kominfo.go.id/berita-kepala-baru-semangat-baru-19-712>.

– <https://balitbangsdm.kominfo.go.id/satker/paipk/berita-peluncuran-indeks-masyarakat-digital-indonesia-tahun-2022-5-37>.

– <https://kilaskementerian.kompas.com/kemenkominfo/read/2022/12/22/10233171/lewat-digiers-day-kemenkominfo-hadirkan-terobosan-peningkatan-kompetensi>

– <https://kumparan.com/kumparantech/skor-indeks-masyarakat-digital-37-8-dari-100-literasi-digital-ri-masih-rendah-1zTXrvrAHO/4>.

– https://lan.go.id/?page_id=1872.

– <https://techno.okezone.com/read/2022/12/27/54/2734976/menkominfo-indeks-masyarakat-digital-indonesia-2022-sebesar-37-8>.

– <https://telset.id/news/telko/kominfo-indeks-masyarakat-digital-indonesia-2022-ini-hasilnya>.

– <https://www.antaraneews.com/berita/2887373/pemerintah-siapkan-sdm-digital-yang-unggul-dan-berdaya-saing>.

– <https://www.antaraneews.com/berita/3314226/pemerataan-indeks-masyarakat-digital-perlu-digiatkan-di-daerah>

– https://www.setneg.go.id/baca/index/sdm_unggul_bekal_indonesia_bersaing_dalam_ekonomi_digital_dan_ekonomi_hijau_1

– Sarwohadi, Sandjaja. 2021. *Arah Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP 2022*. Disampaikan pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dari https://bkd.jatengprov.go.id/assets/download/Arah_Pembangunan_Bid._Aparatur_Negara_dan_Ranwal_RKP_2022_final_-_BKD_Jateng.pdf



PERJANJIAN KINERJA 2022

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**



PERJANJIAN KINERJA

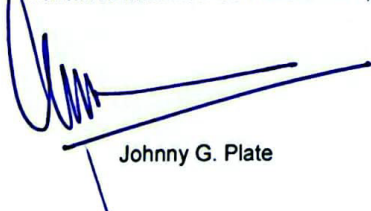
TAHUN 2022

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Jumlah Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> a. SDM Umum (Termasuk Kawasan Prioritas) b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 2. Jumlah ASN Nasional yang Mendapatkan Pelatihan Teknis TIK, Fungsional dan Manajerial 3. Persentase (%) Peserta yang Lulus Program Beasiswa S2 dan S3 Bidang TIK/Digital yang Lulus Tepat Waktu	200.000 Peserta a. 186.000 Peserta b. 14.000 Peserta 2.675 Peserta ASN 90% (dari 134 Mahasiswa)
2.	Tercapainya target PNBPN Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100% (Rp.19.309.000.000,-)
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80 (skala 1-100)

Kegiatan	Anggaran
1. Pengembangan Kompetensi Digital Bagi Masyarakat	Rp. 677.093.000.000,-
2. SDM Vokasi Bidang Kominfo	Rp. 54.789.612.000,-
3. Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kominfo	Rp. 112.651.561.000,-
4. Pengembangan Riset dan Penelitian Bidang TIK	Rp. 1.500.000.000,-
5. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 128.437.091.000,-

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny G. Plate

Jakarta, 28 Januari 2022

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Hary Budiarto

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hary Budiarto

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Johnny G. Plate

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

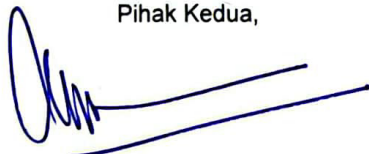
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2022

Pihak Kedua,



Johnny G. Plate


Pihak Pertama,



Hary Budiarto



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NOMOR SOP	: 1240/BLSDM.1/OT.02.02/07/2022
TGL. PEMBUATAN	: 15 Juli 2022
TGL REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: -
DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Badan Litbang SDM  (Dra. Haryati, M.I.Kom) NIP. 19630502 198903 2 003
NAMA SOP	: VERIFIKASI JUMLAH PESERTA DTS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/PER/M.KOMINFO/07/2010/ tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Nota Dinas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Nomor 41/BLSDM/PR.04.04/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Definisi dan Kriteria Peserta Program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy TA 2022 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Laporan 2. Komputer / Printer / Scanner 3. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) VERIFIKASI PESERTA DTS









Nomor : 1240/BLSDM.1/OT.02.02/07/2022
 Tanggal Ditetapkan : 15 Juli 2022
 Tanggal Revisi : -

Dasar Hukum :

- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12/PER/M.KOMINFO/07/2010/ tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Nota Dinas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Nomor 41/BLSDM/PR.04.04/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Definisi dan Kriteria Peserta Program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy TA 2022

NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	KEPALA BLSDM	SEKRETARIS BLSDM	KEPALA SATKER/UPT	ADMIN WEB DTS POKJA/SATKER/ UPT	POKJA AKADEMI PUSAT/ TIM PENGEMBANGAN SDM SATKER UPT	TIM MONITORING DAN EVALUASI SATKER UPT	KETUA TIM PERENCANAAN, PELAPORAN, DAN KERJA SAMA	TIM EVALUASI DAN PELAPORAN SETBADAN	MUTU BAKU			KET
										SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mendisposisikan permintaan verifikasi data capaian DTS									Surat dari Seljen	30 menit	Disposisi KaBLSDM	
2.	Menindaklanjuti disposisi Kepala BLSDM									Disposisi KaBLSDM	30 menit	Disposisi SesBLSDM	
3.	Menindaklanjuti disposisi Sekretaris BLSDM									Disposisi SesBLSDM	30 menit	Nodin SesBLSDM	
4.	Menyiapkan raw data dukung pelatihan dari back-end website DTS (data peserta yang telah diverifikasi keabsahannya, mitra pelatihan, ID pelatihan dan tema pelatihan)									Nodin SesBLSDM	30 menit	Raw data	
5.	Melakukan kroscek data peserta onboarding dengan data kehadiran paling sedikit sebanyak 10% dari total jam pelatihan (JP) berdasarkan daftar hadir di lokasi pelatihan (pelatihan offline) maupun mengikuti live session/sesi sinkronus/sesi asinkronus (pelatihan online dan/atau hybrid)									Raw data	1 hari	Data peserta memenuhi JP onboarding	
6.	Verifikasi peserta: a. menerima bahan/data hasil kroscek data kehadiran pelatihan; dan b. melakukan verifikasi kesesuaian kriteria data peserta onboarding sesuai arahan Kepala Badan Litbang SDM pada Nota Dinas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Nomor 41/BLSDM/PR.04.04/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Definisi dan Kriteria Peserta Program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy TA 2022 dan melaporkan kepada Kepala Satker/UPT									Data peserta memenuhi JP onboarding	1 hari	Data peserta onboarding terverifikasi	
7.	Menerima data hasil verifikasi peserta DTS dan memberikan perintah kepada admin web DTS satker/UPT untuk melakukan pemutakhiran data peserta onboarding sesuai hasil verifikasi									Data peserta onboarding terverifikasi	1 hari	Data yang telah dimutakhirkan	
8.	Melakukan pemutakhiran data peserta di web DTS melalui back-end									Data yang telah dimutakhirkan	1 hari	Bahan/data DTS di website yang telah dimutakhirkan	

oo	AKTIVITAS/KEGIATAN	KEPALA BLSDM	SEKRETARIS BLSDM	KEPALA SATKER/UPT	ADMIN WEB DTS POKJA/SATKER/UPT	POKJA AKADEMI PUSAT/ TIM PENGEMBANGAN SDM SATKER UPT
9	Melaporkan rekapitulasi data peserta lintas akademi internal satker/UPT yang valid dan telah diverifikasi					
10	Menerima laporan data peserta terverifikasi untuk diteruskan ke SetBLSDM cq. Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Kerja Sama					
11	Menerima laporan data peserta DTS terverifikasi dari satker/UPT					
12	Rekapitulasi dan penyusunan laporan: a. merekapitulasi data peserta DTS; b. menyiapkan laporan capaian peserta DTS untuk dianalisis dan dikompilasi lintas akademi dan lintas satker/UPT dalam bentuk matriks.					
13	Memeriksa draft laporan capaian peserta DTS dan meneruskan ke SesBLSDM					

oo	AKTIVITAS/KEGIATAN	KEPALA BLSDM	SEKRETARIS BLSDM	KEPALA SATKER/UPT	ADMIN WEB DTS POKJA/SATKER/UPT	POKJA AKADEMI PUSAT/ TIM PENGEMBANGAN SDM SATKER UPT
14	Menerima laporan capaian peserta DTS dan memberi perintah untuk menyiapkan pelaksanaan rapat kerja dengan satker/UPT pelaksana DTS.					
15	Melaksanakan rapat bersama satker UPT pelaksana DTS untuk mengonfirmasi data, mengidentifikasi kendala dan hambatan, mendiskusikan solusi serta mitigasi risiko					
16	Memeriksa draft laporan data peserta DTS kemudian menyerahkan kepada KaBLSDM SDM untuk dilaporkan.					
17	Menerima laporan capaian peserta DTS untuk diklaim dan diteruskan ke Setjen cq Biro Perencanaan sebagai capaian kinerja rutin bulanan	 				
JUMLAH WAKTU						

TIM MONITORING DAN EVALUASI SATKER UPT	KETUA TIM PERENCANAAN, PELAPORAN, DAN KERJA SAMA	TIM EVALUASI DAN PELAPORAN SETBADAN	MUTU BAKU			KET
			SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
			Bahan/data DTS di website yang telah dimutakhirkan	1 hari	Rekapitulasi data yang telah diverifikasi	
			Rekapitulasi data yang telah diverifikasi	30 Menit	Disposisi	
			Disposisi	30 Menit	Disposisi	
			Disposisi	1 hari	Bahan/data laporan yang terkumpul	
			Bahan/data laporan yang terkumpul	1 hari	Hasil analisis dan kompilasi bahan laporan evaluasi	

TIM MONITORING DAN EVALUASI SATKER UPT	KETUA TIM PERENCANAAN, PELAPORAN, DAN KERJA SAMA	TIM EVALUASI DAN PELAPORAN SETBADAN	MUTU BAKU			KET
			SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
			Hasil analisis dan kompilasi bahan laporan evaluasi	1 hari	Nodin/Undangan Rapat	
			Nodin/Undangan Rapat	1 hari	Draft Laporan hasil rapat kerja	
			Draft Laporan hasil rapat kerja	3 jam	Draft Laporan hasil rapat kerja	
			Draft Laporan hasil rapat kerja	2 jam	Dokumen Laporan Capaian Data Peserta DTS Bulanan	
9 hari 8 jam						

Disahkan Oleh :
Sekretaris Badan Litbang SDM

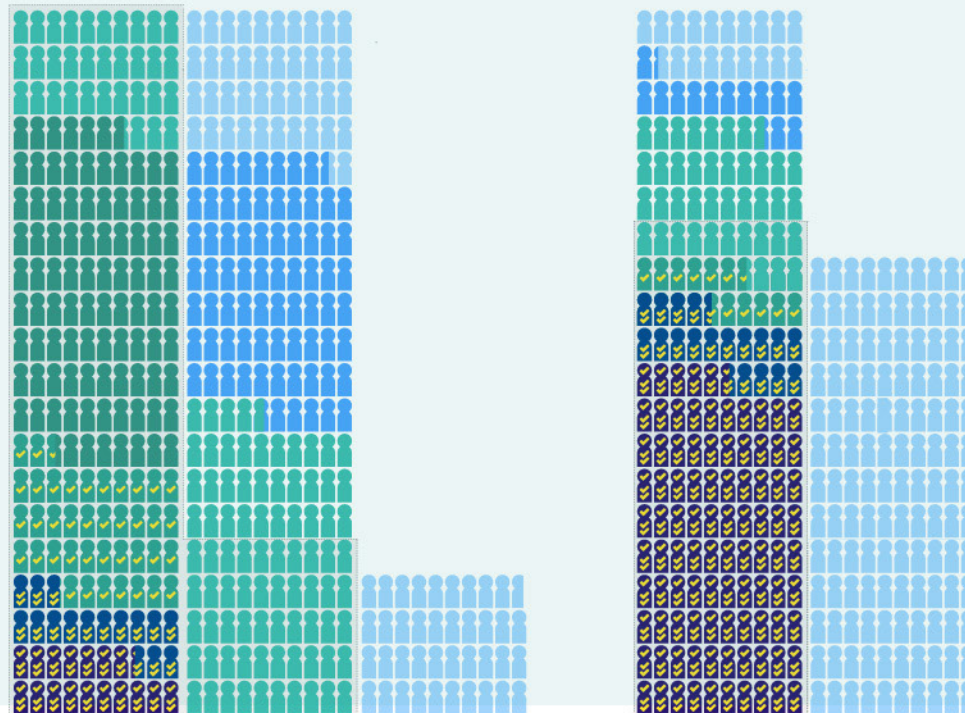
Dra. Haryati, M.I.Kom
NIP. 19630502 198903 2 003

Peserta Digital Talent Scholarship 2022

Total

360.442
 ■ Pendaftar
200.000
 ■ Target peserta
283.931
 ■ Diterima
242.862
 ■ Peserta/Onboarding
192.659
 ■ Menyelesaikan Pelatihan/Completion

26.164 ✓
 ■ Berhak Sertifikasi Lanjutan
17.043 ✓✓
 ■ Ikut Sertifikasi Lanjutan
12.629 ✓✓✓
 ■ Lulus Sertifikasi/Kompeten

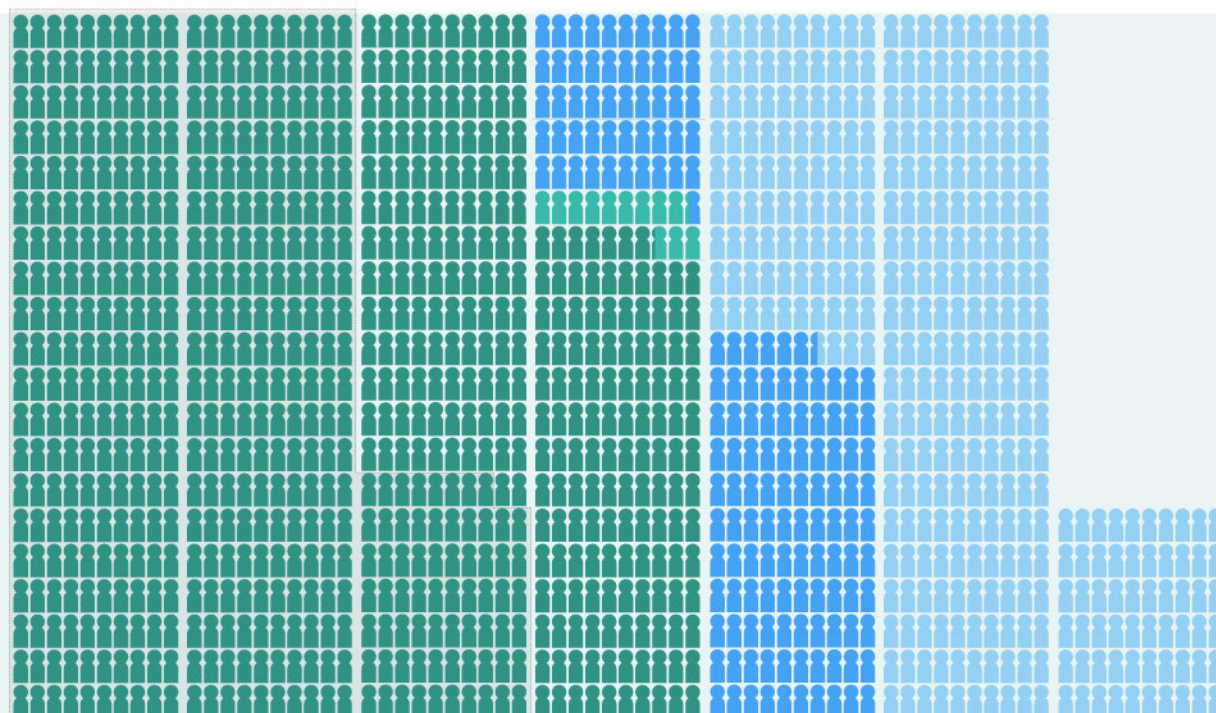


FGA

43.996
 ■ Pendaftar
25.000
 ■ Target peserta
35.850
 ■ Diterima
28.496
 ■ Peserta/Onboarding
16.692
 ■ Menyelesaikan Pelatihan/Completion
7.266 ✓
 ■ Berhak Sertifikasi Lanjutan
3.299 ✓✓
 ■ Ikut Sertifikasi Lanjutan
1.731 ✓✓✓
 ■ Lulus Sertifikasi/Kompeten

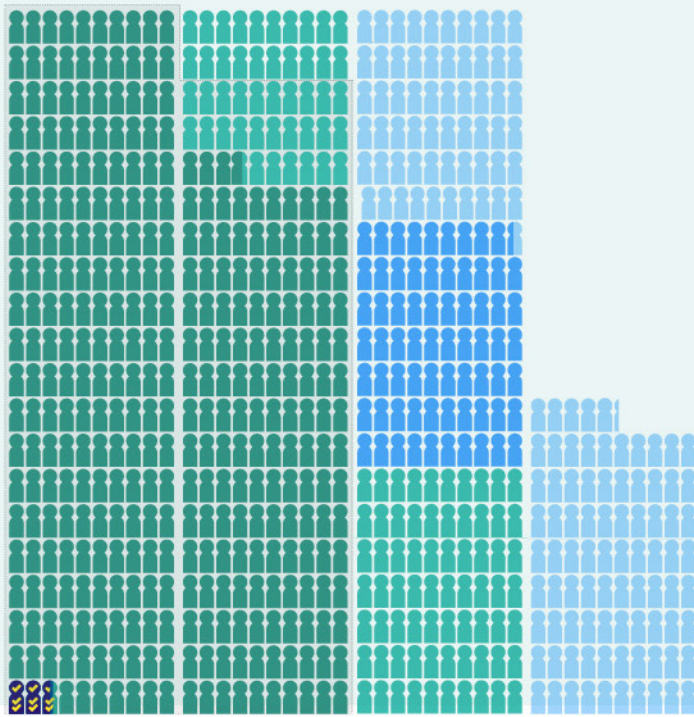
VSGA

32.947
 ■ Pendaftar
14.000
 ■ Target peserta
18.123
 ■ Diterima
16.794
 ■ Peserta/Onboarding
12.679
 ■ Menyelesaikan Pelatihan/Completion
12.679 ✓
 ■ Berhak Sertifikasi Lanjutan
11.449 ✓✓
 ■ Ikut Sertifikasi Lanjutan
9.570 ✓✓✓
 ■ Lulus Sertifikasi/Kompeten



DEA

125.968
 ■ Pendaftar
56.800
 ■ Target peserta
90.650
 ■ Diterima
74.904
 ■ Peserta/Onboarding
73.803
 ■ Menyelesaikan Pelatihan/Completion



TA

68.509
 Registrasi / Pendaftaran

38.000
 Target peserta

53.936
 Diterima

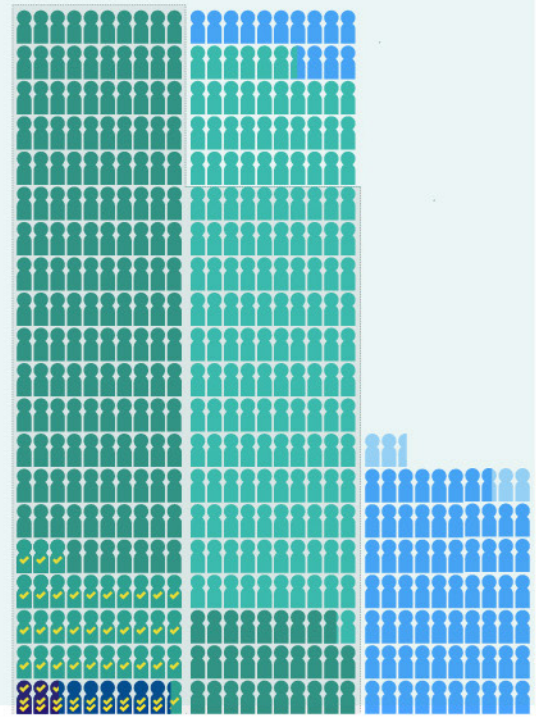
47.579
 Peserta/Onboarding

35.380
 Menyelesaikan Pelatihan/Completion

304
 Bernak Sertifikasi Lanjutan

283
 Ikut Sertifikasi Lanjutan

259
 Lulus Sertifikasi/Kompeten



PROA

47.260
 Registrasi / Pendaftaran

35.000
 Target peserta

46.776
 Diterima

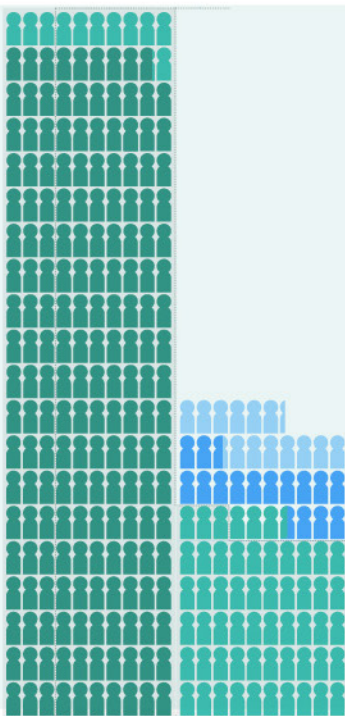
38.637
 Peserta/Onboarding

22.893
 Menyelesaikan Pelatihan/Completion

4.300
 Bernak Sertifikasi Lanjutan

912
 Ikut Sertifikasi Lanjutan

252
 Lulus Sertifikasi/Kompeten



GTA

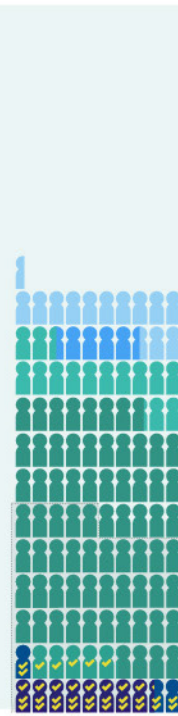
28.633
 Registrasi / Pendaftaran

25.300
 Target peserta

27.284
 Diterima

25.645
 Peserta/Onboarding

18.899
 Menyelesaikan Pelatihan/Completion



TSA

12.063
 Registrasi / Pendaftaran

5.500
 Target peserta

10.741
 Diterima

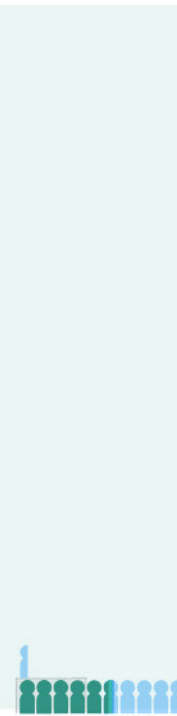
10.244
 Peserta/Onboarding

8.779
 Menyelesaikan Pelatihan/Completion

1.615
 Bernak Sertifikasi Lanjutan

1.100
 Ikut Sertifikasi Lanjutan

817
 Lulus Sertifikasi/Kompeten



DLA

1.066
 Registrasi / Pendaftaran

400
 Target peserta

571
 Diterima

563
 Peserta/Onboarding

534
 Menyelesaikan Pelatihan/Completion



NOTA DINAS

Nomor: 41/BLSDM/PR.04.04/03/2022

Kepada Yth. : Daftar Terlampir.
Dari : Kepala Badan Litbang SDM
Hal : Definisi dan Kriteria Peserta Program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy TA 2022
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Tanggal : 7 Maret 2022

Menindaklanjuti Rapat Pimpinan internal di lingkungan Badan Litbang SDM pada Rabu, 2 Maret 2022 dimana salah satu poin pembahasan adanya perbedaan antar akademi dan antar satuan kerja terkait **Definisi peserta program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy**, berikut disampaikan beberapa hal penting terkait hal dimaksud untuk pelaksanaan Program tahun 2022, sebagai berikut:

1. **Target** Program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy adalah **jumlah peserta**, sehingga diperlukan pemahaman yang sama antar akademi dan antar satuan kerja terkait **Definisi Peserta** yang dihitung sebagai capaian program.
2. Program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy dirancang untuk mengisi kebutuhan Talenta Digital yang jumlahnya 9 juta orang hingga tahun 2030 sehingga dapat mendukung transformasi digital di Indonesia, sehingga perlu dipastikan bahwa materi dalam pelatihan dapat tersampaikan kepada para peserta.
3. Kriteria perekaman data:
 - ☒ **Pendaftar**: Jumlah Pendaftar yang membuat akun di laman digitalent.kominfo.go.id (DTS) dan digileader.kominfo.go.id (DLA).
 - ☒ **Diterima**: Jumlah Peserta lolos seleksi substansi atau *eligible* sebagai peserta dan tercantum di SK Peserta Akademi dan/atau Berita Acara Sidang Penetapan Peserta.
 - ☒ **Peserta/Onboarding**: Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan minimal 10% dari total durasi jam pelatihan.
 - ☒ **Menyelesaikan Pelatihan/Completion**: Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan dengan ketentuan minimal dari total pertemuan sesuai ketentuan masing-masing akademi dan berhak mendapatkan Sertifikat Completion.

- **Sertifikat Completion** : Sertifikat yang di tanda tangan Kepala Balitbang SDM secara elektronik untuk peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan pelatihan.
 - **Berhak Sertifikasi Lanjutan**: Dilihat dari peserta Completion, berapa jumlah peserta yang skornya berhak mengikuti Sertifikasi.
 - **Ikut Sertifikasi Lanjutan**: Jumlah peserta yang mengikuti ujian sertifikasi.
 - **Lulus Sertifikasi (Kompeten)**: Jumlah peserta ujian sertifikasi yang berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi.
4. Berdasarkan poin nomor 3, seseorang dapat dikatakan sebagai **peserta** program Digital Talent Scholarship atau Digital Leadership Academy apabila yang bersangkutan telah **mengikuti pelatihan paling tidak 10%** dari total durasi jam pelajaran (dibulatkan dalam satuan hari).
 5. Definisi peserta pada poin 4, agar dicantumkan dalam Juknis/Juklak masing-masing akademi sebagai rujukan dalam pelaksanaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
HARY BUDIARTO



KOMINFO